

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Vincentia Putri Kusumastuti

NIM : 052114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH**

(Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)



Telah disetujui oleh:

Pembimbing,



Firma Sulistiyowati.,S.E., M.Si., QIA.

Tanggal: 16 Februari 2010

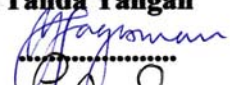
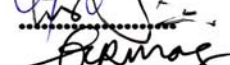
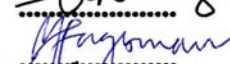


Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Vincentia Putri Kusumastuti
NIM : 052114094

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Maret 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA	

Yogyakarta, 30 Maret 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan

Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 23 Maret 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,

Vincentia Putri Kusumastuti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Universitas Sanata Dharma:

Nama : Vincentia Putri Kusumastuti

NIM : 052114094

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Studi kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2010

Yang menyatakan



Vincentia Putri Kusumastuti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kita mengasihinya, karena Allah telah lebih dahulu mengasihinya kita.
(1 yoh 14:19)

Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah....Tetap jalani hidup ini,
melakukan yang terbaik.
(D'Masiv~Jangan menyerah)

Janganlah menunda sampai besok, apa yang sebenarnya dapat kau
selesaikan hari ini. Kalau tidak, hari ini akan hilang selama-lamanya dan
tidak akan pernah kembali lagi.
(Alfonsus Maria de Liguori)

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya
dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain.
(William Wordsworth)

Dengan rendah hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Ayah dan Ibuku tercinta

Kakak dan Adikku tersayang

Seseorang yang selalu ada di hatiku

Semua saudara, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukungku

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Vincentia Putri Kusumastuti
052114094
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Seberapa besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Untuk mengetahui berapa besar efisiensi dan efektivitas PAD selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efisiensi, dan analisis efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi yang diberikan dari PAD mempunyai rata-rata sebesar 53,13% selama lima tahun anggaran yang diteliti, (2) efisiensi PAD tahun 2004 sebesar 4,74%, tahun 2005 sebesar 4,90%, tahun 2006 sebesar 4,64%, tahun 2007 sebesar 4,72% dan tahun 2008 sebesar 4,52%, efektivitas PAD tahun 2004 sebesar 114,52%, tahun 2005 sebesar 107,49%, tahun 2006 sebesar 118,45%, tahun 2007 sebesar 114,17% dan tahun 2008 sebesar 115,51%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa efisiensi dan efektivitas PAD selama 5 tahun anggaran yakni tahun 2004 sampai tahun 2008 semua sudah tergolong efisien dan efektif.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF CONTRIBUTION, EFFICIENCY, AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE TOWARD REGIONAL REVENUE

(A Case Study in Daerah Istimewa Yogyakarta Province Government)

Vincentia Putri Kusumastuti
NIM : 052114094
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

The purposes of the study were to find out: (1) the amount of contribution is given by regional original income of Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) to figure out how much was the efficiency, and effectiveness of regional original income during fiscal years of 2004 to 2008. The research was a case study. The data collecting techniques used were interview and documentation. The data analysis techniques used were contribution analysis, efficiency analysis, and effectiveness analysis.

The result showed that: (1) the contribution given by regional original income on the average was 52,13% during fiscal years from 2004 till 2008, (2) the efficiency of regional original income in 2004 was 4,74%, 4,90% in 2005, 4,64% in 2006, 4,72% in 2007 and 4,52% in 2008, the effectiveness of regional original income in 2004 was 114,52%, 107,49% in 2005, 118,45% in 2006, 114,17% in 2007 and 115,51% in 2008. Therefore, it could be seen that the efficiency and effectiveness of regional original income during fiscal years from 2004 till 2008 had been classified to be effective and efficient.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih ke hadirat Yuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan mengembangkan kepribadian selama masa kuliah.
2. Drs. YP. Supardiono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, SE, M.Si., QIA, selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Bp. Nugri dan seluruh karyawan/staf Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

7. Ayah dan Ibu tercinta: Bp. Petrus Kusnar Sudjadi di Surga. Terima kasih pak, atas doa, pengorbanan dan kasih sayang yang telah kau berikan sepanjang hidupmu. Ibu Th. Yuni Astuti, berkat doa, perjuangan dan kasih sayang dari ibu aku dapat menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih bu, kalian segalanya bagiku.
8. Kakak dan adikku tersayang: Mas Bayu+Mb Bunga dan Dhimas, tempat kuberbagi dan selalu memberiku semangat dalam segala hal.
9. Mas Iok atas kasih sayangnya dan selalu setia mendengarkan keluh kesahku, serta tak pernah bosan mengingatkanku untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbah putri, Mbah Kakung, Bulik Trie, Om Anwar, Jefri, Om Heru, Om Joko dan semua saudaraku di jogja, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepadaku.
11. Keluarga kecilku di Jogja: Sobat Anip+Aling, Esti+Fani, Entes+Re, Galih+Sakti, Enik, Inuk, Pandu, Lilik, Magda+Tino, Mamam+Ayahnya, Tete, Nenek Santi, Mas Wisnu (guguk), dan Mas Rio, terima kasih ya berkat kalian aku tetap dapat bertahan mejalani kehidupanku di sini. Aku sayang kalian.
12. Keluarga besar Kos Narada 5A, kita seataap namun beda kamar, terima kasih atas canda tawa, dan rasa kekeluargaan yang telah kalian berikan.
13. Sahabat-sahabatku: Genk Reseh ku (Nona, Yenie, Magda, Endah, Mu2n, Si-Joe), Adut, Lius, Topan, Adi, Bojes, Hara, Susie, Rere, Lia, Wina, Noel+Cipit, Fani, Simbah, Chandra, Simon, Jalu, Bangkit, Jhon, dan teman-teman AKT'05 terutama kelas B dan MAN'05, serta semua yang tidak dapat di sebutkan satu per satu namun selalu ada di hati, terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan.

14. Kakak-kakak ku: Mas Harto, Mas Wambie, Mas Katri, Mas Beni, Mas Jampez, Mas Guntur, Mas Andre, Mas Topenk, Mb Teeka, Mas Detik+Mb Icha, Iyoth+Mas Joe, Mas Yosi, terima kasih telah mau membimbing, member semangat dan menghiburku saat aku sedih, aku bangga punya kakak seperti kalian.
15. Teman-teman seperjuangan MPT dan KKP: Rhea, Lius, Bodonk, Ratih, Asti, Aufrida, Lorita, Afan, Mb Lina, Mas Andika, Mas Didit, terima kasih sudah mau membantuku, ayo Semangat kawan! Keluarga KKP (Bp ibu Rochmat, Bp ibu Syamsul, Kocek, Matt, Vita, Mike, Fae) kalian adalah keluarga baruku.
16. Teman-temanku berkarya: anggota PSFE, Mudika St.Theodorus Mrican, J-W Choir, Install Band, Komunitas Lektor Gereja St.Antonius Kotabaru, semua staff serta penyiar di Radio Impact Fm dan Radio Komunitas Lima Cemara Fm.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Vincentia Putri Kusumastuti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Karya	iv
Lembar Publikasi	v
Motto dan Persembahan.....	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Otonomi Daerah.....	7
B. Keuangan Daerah.....	8
C. Penerimaan Daerah	9

	D. Pendapatan Asli Daerah.....	12
	E. Efektivitas dan Efisiensi	14
BAB III	METODE PENELITIAN.....	18
	A. Jenis Penelitian	18
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
	C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	18
	D. Teknik Pengumpulan Data	19
	E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	22
	A. Sejarah Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	22
	B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	27
	C. Investasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	31
	D. Potensi Alam Daerah Istimewa Yogyakarta.....	34
	1. Fisiografi.....	34
	2. Bentang Lahan dan Bahaya alami	35
	3. Sumber Daya Air	36
	4. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang	39
	5. Pengelolaan Lingkungan Hidup	41
	6. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan	42
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	46
	A. Kontribusi Pendapatan Ash Daerah.....	46
	B. Analisis Efektivitas dan Efisiensi PAD	49

1. Efektivitas PAD	49
2. Efisiensi PAD	53
BAB VI PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Keterbatasan Penelitian	58
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabe14.1 Persebaran Curah Hujan di DIY	36
Tabel 4.2 Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura	41
T'abel 4.3 Luas Sawah dan Bukan Sawah di DIY	42
Tabel 4.4 Luas Hutan di DIY	43
Tabel 5.1 Peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah	46
Tabel 5.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	49
Tabel 5.3 Biaya Pemungutan dan Realisasi PAD	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada sebuah tantangan baru yaitu pemenuhan sendiri kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hal ini telah diatur dengan Ketetapan UU No. 22 tahun 1999 (Tentang Pemerintah Daerah) dan UU No. 25 Tahun 1999 (Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) serta selanjutnya dipertajam dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom). Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai batas kewenangan yang cukup luas untuk menentukan sumber-sumber pendapatannya.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat, sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Dengan adanya otonomi daerah, dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai

dengan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan diperlukan kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Dalam sistem Negara Kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian, antara keuangan Negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat yang juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, serasi, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun, antara lain dengan meningkatkan dana secara wajar dan tertib termasuk sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping bagi hasil pajak dan non pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dengan PAD yang semakin meningkat

diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD pada suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman yang diterimanya, berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan PAD juga dituntut peran aktif dari instansi / dinas / unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu modal dasar dari penerimaan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga daerah.

Karena komponen Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah..

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004-2008?

3. Bagaimana efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004-2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai tahun 2008.
3. Untuk mengetahui efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui sejauhmana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah sehingga pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

2. Bagi penulis

Untuk mengetahui sejauh mana penulis mampu menyerap teori-teori yang didapat selama kuliah dan diterapkan dalam praktek.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk penelitian berikutnya dan sebagai tambahan referensi untuk perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung permasalahan dan pembahasan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang akan dijalankan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data-data yang dicari selama penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis data serta pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dibuat oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Undang-undang no.22 tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah.

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas keuangan daerah. Anggaran

daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) hal ini selaras dengan PP RI No 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun ajaran tertentu. Oleh karena itu anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Keuangan Daerah

Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga proses otonomi tidak dapat berjalan lancar, sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber PAD merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah.

Lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.

- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

Asas-asas keuangan daerah :

- a. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- c. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3. Penerimaan Daerah

Dalam usaha penyelenggara pemerintah daerah, diperlukan sumber penerimaan rutin guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. Penerimaan daerah mempunyai peranan dalam membiayai pengeluaran daerah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan.

Salah satu dampak otonomi daerah adalah perlu dilakukannya reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu di reformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 yang sekarang sudah diperbaharui menjadi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU no.33 tahun 2004:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Munir.2003:39)

Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus(DAK)

c. Pinjaman daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) PP No. 107 tahun 2000 adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Menurut Pasal 51 UU no.33 tahun 2004, pinjaman daerah bersumber dari:

1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah lain
3. Lembaga Keuangan Bank
4. Masyarakat

d. Lain-lain Penerimaan yang sah

Pendapatan daerah yang lain dan sah berasal dari sumber-sumber antara lain, hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro, dan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah, atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan pihak DPRD

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan”. Dan makna dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri menurut UU No.33 tahun 2004 adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan asli daerah sangat diharapkan dapat sebagai penyangga utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh PAD, berarti semakin tinggi kualitas otonomi PAD yang potensial berada di daerah tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah :

a. Pajak Daerah (*Local Tax*)

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum. Pajak daerah dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang atau badan.

Dasar Hukum

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI No. 18

tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain, UU RI Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

b. *Retribusi Daerah (Local Retribution)*

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran antar jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan.

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, yaitu:

1. Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari objeknya retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, selama jasa pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-dibuat dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. *Retribusi dipungut oleh daerah*

Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
Antara lain terdiri dari: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain PAD yang sah (*Other Receipts*)
Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah. Penerimaan daerah dari sektor ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua macam kinerja yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab

tertentu. Efisien dan efektif biasanya lebih relatif atau komparatif dan bukan bersifat absolut, dalam arti bahwa efisien biasanya dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu.

a. Efektivitas

Adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 1993: 203). Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan, ukuran efektivitas merupakan refleksi output (Bastian, 2006: 78).

Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien juga harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipilih-pilih. Pusat pertanggungjawaban yang efektif adalah unit kerja yang mampu menggunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran atau hasil tertentu. Akan tetapi, seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerjanya maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif.

b. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima (Halim, 2002:134). Kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 5% (Peraturan Daerah Provinsi DIY No.8 Tahun 2005 Bab XXI Pasal 32).

Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat pertanggungjawaban tersebut:

1. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran yang sama.
2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat menggambarkan berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti tingkat efisiensi pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan

yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian mengenai objek tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan pengumpulan datanya berdasarkan objek penelitian, sehingga hasil penelitian hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan kesimpulannya tidak dapat digeneralisasikan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2009.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Obyek Penelitian

Obyek yang diteliti adalah data Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari tahun anggaran 2004 sampai tahun 2008.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yaitu pegawai bagian keuangan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud pendapatan daerah disini yakni hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui apakah penerimaan dari PAD sudah efektif dan efisien digunakan rumus :

a. Efektivitas Pendapatan Asli daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah disini adalah kenyataan yang terjadi dari anggaran yang sudah direncanakan.

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan PAD dan potensi hasil PAD. Selain itu juga untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Untuk menentukan efektif tidaknya hasil PAD, digunakan asumsi sebagai berikut :

- (1) Apabila Kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pungutan PAD semakin efektif.
- (2) Apabila Kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pungutan PAD kurang efektif.

b. Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Efisiensi biaya pemungutan PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Halim, 2002:134)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan Biaya Pemungutan disini adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Efisiensi (daya guna) digunakan juga untuk mengukur bagian dari PAD yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Selain itu juga untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PAD, digunakan tolak ukur efisiensi dengan membandingkan angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pemungutan PAD sebesar 5% dari realisasi.

Cara pengukurannya :

- (1) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 5% (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2005 Bab XXI Pasal 32) dari realisasi, maka dapat dikatakan biaya pemungutan PAD efisien.
- (2) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2005 Bab XXI Pasal 32) dari relisasi, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau *Ngayogyakarta* (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti *Yogya yang kerta*, *Yogya yang makmur*, sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti *Yogya yang makmur dan yang paling utama*. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda

disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

- a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.

- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
- c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan

mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan

tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

DASAR FILOSOFI PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat telah diupayakan dan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diteruskan oleh pengganti beliau, tetap dengan semangat *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang artinya Kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud inipun mencakup seluruh peri kehidupan dalam skala kecil, yaitu Keluarga ataupun masyarakat dan

lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan Dharma Bhakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi diatas, maka visi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut, antara lain :

- a. Terbentuk citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat secara adil dan merata .
- c. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan

global.

- d. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya .
- e. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan .
- f. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka otonomi daerah.

MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi pembangunan serta kondisi daerah yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

- A. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi .
- B. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah .
- C. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang

maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, professional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .

- D. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar Wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan social budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- E. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata *MICE (Meeting Incentive, Conference and exhibition)* utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa .
- F. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan Industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.

Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar local, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.

C. Investasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi D.I. Yogyakarta terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 3.185,80 Km². Bagian selatan wilayah provinsi ini berbatasan dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian utara, timur dan barat berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota yaitu kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan kota Yogyakarta. Pada tahun 2005, di Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.281.800 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,88% dan kepadatan penduduk sebesar 1.030 jiwa per Km².

Pada tahun 2005, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Yogyakarta mencapai angka Rp 16,94 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 3,46 triliun atau sekitar 20,4% dari total PDRB, disusul dengan sektor pertanian sebesar Rp. 3,19 triliun atau sekitar 18,9% dan sektor jasa-jasa sebesar Rp 2,85 triliun atau sekitar 16,8%, sebagaimana grafik disamping.

Pada tahun 2005, tercatat beberapa komoditi unggulan yang dihasilkan di provinsi ini. Untuk tanaman pangan yaitu padi sawah, padi

ladang, padi ladang, jagung kacang tanah dan kacang kedelai. Tanaman perkebunan yang potensial di provinsi ini adalah kelapa dan tebu.

Untuk kegiatan ekspor, pada tahun 2005 provinsi ini mampu mencapai nilai ekspor sebesar US\$ 107,6 miliar, dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh ekspor pakaian jadi sebesar US\$ 45,1 miliar disusul oleh ekspor meubel kayu sebesar US\$ 42,6 miliar, kemudian disusul ekspor sarung tangan kulit, kulit yang disamak dan yang terakhir adalah ekspor lampu.

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, DI Yogyakarta memiliki 2 (dua) kawasan industri yaitu Kawasan Salamrejo yang terletak di Kabupaten Sleman dan Kawasan Piyungan di Kabupaten Bantul. Untuk moda udara, provinsi ini telah memiliki bandar udara yaitu Bandar Udara Adisutjipto yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

Potensi sumberdaya alam bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Lahan sawah irigasi teknis sebesar 18.506 ha (138,27%), dan non irigasi teknis sebesar 29,848 ha (61,72%). Luas lahan palawija, hortikultura, dan sayur sayuran sebagian besar ditanami jagung dan kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu, dengan perincian jagung seluas 79,704 ha, kedelai 34.292 ha, kacang tanah 67.759 ha, dan ubi kayu 58,735 ha, sedangkan sisanya berupa kacang hijau, ubi jalar, dan sayur sayuran.

Adapun jumlah produksi palawija, hortikultura dan sayur sayuran adalah jagung sebanyak 219.758 ton, padi 715,684 ton, kedelai 402 ton, kacang tanah 66.697 ton, kacang hijau 550 ton, ubi kayu 978,494, Ubi jalar 6.777 ton, sayuran 67.703 ton, dan buah buahan 197.204 ton. Menurut jenis

komoditas kehutanan yang dikembangkan berupa produk kayu dan non kayu. Luas kawasan hutan seluas 74.992,97 ha (23,54% dari luas wilayah), dengan perincian hutan Negara 18.044,97 ha (5,66%), hutan rakyat 54,948 ha (17,88%). Sementara itu, produksi kayu terdiri dari jati 111.930,393 m³, mahoni 16.490,574 m³, sono keling 8.412,866 m³, akasia 3.292,287 m³ dan rimba campur 2.787,235 m³, maka dihasilkan kayu bulat sebanyak 8.022.009,30 m³. Potensi dan pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari perairan umum sebesar 3.133,5 ha (tingkat pemanfaatan 5,20 ha), rambak 650 ha tingkat pemanfaatan 58 ha), sawah tambak 240 ha belum dimanfaatkan), kolam 4.630,2 ha (tingkat pemanfaatan 915 ha), dan Mina Padi 10.265,6 ha (tingkat pemanfaatan 1,233 ha). Di samping itu, potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam khususnya perikanan di Selatan Jawa, terdiri dari puluhan ton/tahun tingkat pemanfaatan 45%, mencapai 25.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 18.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 44%, tenggiri 10.000 ton/tahun tingkat pemanfaatannya 11%, dan pelagis kecil 431.000 ton/tahun.

Potensi peternakan di antaranya populasi ternak sapi potong 249.480 ekor, sapi perah dengan produksi 8.623 ekor dengan jumlah produksi 8,900.215 liter/tahun, ternak kecil, dan unggas. Dari seluruh jenis peternakan tersebut, ternak unggas cukup besar, yaitu ayam buras 4.604.824 ekor/tahun, ayam petelur 2 494.008 ekor/tahun, dan ayam pedaging 22.020,306 ekor.

Di bidang perkebunan, terdapat banyak potensi di antaranya teh, kopi, tembakau, kakao, lada, kelapa, vanili, dan tebu. Dari jenis tanaman

perkebunan, areal tanaman kelapa mempunyai areal yang cukup besar, yaitu 44,119,59 ha.

Di bidang pertambangan dan energi, terdapat 28 jenis bahan galian, naik dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu kapur putih memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 621.073,6 ton, serta beberapa jenis tambang lainnya, seperti andesit (44,097,2 ton), bentonit/abu bumi (1.699,16 ton), dan kaolin/feldstar (1.225 ton).

D. Potensi Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Fisiografi

- a. Gunung Api Merapi dan lereng gunung api, terletak di bagian utara DIY pada ketinggian ± 500 m hingga ± 2.911 m, dengan susunan material dari endapan aktivitas Gunung Api Merapi.
- b. Dataran Aluvial, terletak di bagian tengah membentang ke selatan DIY hingga Samudra Indonesia. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
- c. Pegunungan Kulon Progo yang terletak di bagian barat DIY dengan batas bagian timur adalah lembah progo dan bagian selatan dibatasi oleh dataran aluvial pantai. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.
- d. Dataran Tinggi Gunungkidul, yang meliputi bagian tenggara DIY.

Bagian utara daerah ini dibatasi oleh pegunungan Batur Agung dengan garis yang terjal dan memanjang. Bagian tengah merupakan ledok Wonosari dengan topografi datar bergelombang dan pada bagian selatan merupakan perbukitan *karst* yang disebut Gunung Sewu. Lereng perbukitan *karst* tersebut curam dan merupakan lahan kritis.

2. Bentang Lahan dan Bahaya Alami

Secara geomorfologis, Propinsi DIY terdiri dari 6 kelompok satuan bentuk lahan utama, yaitu bentuk marin dan eolin, fluvial, struktural-denudasional, solusional, vulkanik, dan denudasional.

Jenis bahaya alami dan sebarannya secara keruangan di DIY adalah:

- a. Daerah gunung api aktif pada kerucut gunung api Merapi yang ditandai adanya akumulasi langsung dari material hasil aktifitas gunung api secara periodik.
- b. Daerah bahaya gunung api utama: pada wilayah di bawah kerucut gunung api yaitu pada lereng gunung api dan lembah.
- c. Daerah bahaya gunung api pertama: pada lereng gunung api dan sebagian lereng gunung api.
- d. Daerah bahaya gunung api kedua: pada sepanjang sungai utama sebagai media aliran lahar yang melintasi lereng kaki gunung api hingga dataran gunung api seperti Sungai Code dan Sungai Opak.
- e. Daerah longsor lahan dan erosi linier: pada sebagian besar

pegunungan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo.

- f. Daerah erosi berat: pada pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zone selatan.
- g. Daerah erosi sedang: pada daerah perbukitan monoklinal (pada formasi Sentolo) yaitu di bagian tengah DIY.
- h. Daerah erosi ringan: pada ledok Wonosari dan daerah dataran *aluvial karst* pada zone selatan di daerah Gunungkidul.
- i. Daerah erosi angin dan beragam: pada sepanjang gumuk pasir pantai selatan.
- j. Daerah banjir: pada sepanjang dataran rendah bagian selatan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- k. Daerah tanpa atau sedikit bahaya alami: pada dataran *aluvial*, dataran *aluvial* gunung api, lereng kaki gunung api.

3. Sumberdaya Air

a. Curah Hujan

Persebaran curah hujan di DIY relatif tidak merata besarnya.

Tabel 4.1

No.	Wilayah	Curah Hujan (mm/tahun)
1	Kabupaten Sleman	2500 – 3000
2	Kabupaten Kulon Progo	1750- 2500
3	Kabupaten Bantul	< 1750
4	Kabupaten Gunungkidul	< 1750

b. Air Sungai/Aliran Permukaan

Secara umum, sungai-sungai yang berasal dari gunung Merapi mempunyai debit yang relatif sinambung sepanjang tahun dibanding sungai-sungai di daerah Gunungkidul dan Kulon Progo.

c. Air Tanah

Berdasarkan kondisi akifernya, ketersediaan air tanah dari yang terbaik hingga terburuk di DIY secara berurutan adalah:

1) Kabupaten Sleman; 2) Kabupaten Bantul; 3) Kabupaten Kulon Progo; dan 4) Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi akifer terbaik di Kabupaten Sleman didukung oleh struktur geologi yang bersifat porus dan curah hujan yang tinggi. Namun demikian beberapa daerah bagian utara Sleman, yaitu Cangkringan dan Turi tidak mempunyai akifer yang baik. Hal ini disebabkan oleh tebalnya material yang belum padu dan lembah-lembah yang dalam.

Di wilayah Kabupaten Sleman juga banyak dijumpai mata air; keberadaan mata air pada umumnya mengikuti batas satuan geomorfologi. Di daerah ini terdapat paling tidak 4 jalur mata air yaitu jalur mata air Bebeng, Sleman-Cangkringan, Ngaglik, dan mata air Yogyakarta.

Di wilayah Kabupaten Bantul, secara geomorfologis terdiri dari bentuk lahan dataran aluvial gunung api (gunung api muda), perbukitan

struktural terisolasi yang terdiri atas batu napal, endapan (eolin dan marin), dan pegunungan denudasional terdiri atas batuan breksi/tufa. Wilayah rawan air tanah terdapat di Kabupaten Bantul bagian timur. Terdapat beberapa tempat yang kualitas air tanahnya kurang baik yaitu di wilayah beting pantai dan dataran aluvial pantai.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo, ditinjau dari aspek geologi merupakan wilayah yang terdiri dari bahan terobosan andesit, andesit tua, formasi Nanggulan, formasi Jonggrangan, formasi Sentolo, dan formasi endapan aluvial serta koluvium. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat mintakat air tanah non-akifer dan akifer. Untuk air tanah non akifer, penyebarannya mencakup wilayah pegunungan yang merupakan bahan terobosan andesit, andesit tua formasi Bemmelen dan formasi Jonggrangan. Namun demikian di daerah ini dijumpai akifer lokal yang sempit. Sementara mintakat akifer didapatkan pada daerah guduk pasir, bentuk lahan fluvial, lahan koluvial, dan pada formasi Sentolo.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari air non-akifer pegunungan Gamping dan non akifer vulkanik tua, dan akifer pada lembah Oya dan Ledok Wonosari. Non-akifer di pegunungan gamping mempunyai air tanah yang sulit untuk dilacak. Sementara di wilayah Ledok Wonosari dijumpai akifer dengan permeabilitas rendah sampai sedang. Di Kabupaten Gunungkidul banyak dijumpai mata air yang terdapat di wilayah selatan (pegunungan Gamping) muncul pada ketinggian (elevasi) yang lebih rendah dari daerah permukiman, sehingga

sulit untuk memanfaatkannya.

4. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Secara garis besar struktur ruang terutama dibentuk oleh adanya prasarana wilayah dan sistem permukiman. Sistem prasarana transportasi di DIY terdiri dari sistem transportasi darat (jalan dan kereta api), sistem transportasi udara dan transportasi laut walaupun hanya terbatas pada pelabuhan pangkalan pendaratan ikan dengan skala terbatas.

Pada sistem transportasi jalan, di DIY terdapat jalan arteri primer yang terdiri dari jalan lingkar serta jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta-Cilacap melalui Wates, Yogyakarta-Surakarta melalui Prambanan, dan Yogyakarta-Semarang melalui Tempel. Di samping itu untuk jalan-jalan dengan fungsi kolektor primer antara lain jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta-Pakem melalui Depok, Ngaglik. Yogyakarta-Kalibawang melalui Godean, Yogyakarta-Wates melalui Bantul, Srandakan, Yogyakarta-Parangtritis melalui Pundong. Yogyakarta-Rongkop melalui Banguntapan, Piyungan, Patuk, Wonosari. Semanu-Sukoharjo melalui Karangmojo, Semin. Prambanan-Tempel melalui Cangkringan, Pakem, Turi.

Dalam sistem transportasi kereta api di DIY terdapat stasiun Yogyakarta yang dapat menghubungkan langsung ke stasiun Jakarta-Merak, dan Surabaya-Banyuwangi.

Untuk Sistem transportasi udara, di DIY terdapat bandar udara Adisutjipto sebagai bandara komersial skala pelayanan nasional dan

internasional terbatas.

Pertumbuhan kota-kota di DIY pada saat ini terdiri dari satu perkotaan Yogyakarta yang secara administratif terletak pada Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul, serta 4 kota kabupaten dan kota-kota kecamatan. Sampai dengan saat ini perkotaan Yogyakarta tidak saja berkembang ke arah utara-timur, namun juga mengarah ke selatan dan barat. Dilihat dari jumlah penduduknya, lebih sepertiga penduduk DIY berada di perkotaan Yogyakarta, dengan demikian perkotaan Yogyakarta telah mengalami proses primasi yang dalam hal ini proporsi jumlah penduduk cenderung kurang proporsional bila dibanding dengan jumlah penduduk wilayah DIY, sehingga diwaktu mendatang diperlukan adanya usaha-usaha pengelolaan pertumbuhan perkotaan Yogyakarta.

Perkotaan Yogyakarta, secara fungsional merupakan salah satu simpul utama yang mempunyai wilayah pelayanan melebar sampai dengan Jawa Tengah bagian selatan (Koridor Selatan). Hal ini ditunjang dengan posisi strategis simpul Yogyakarta serta keberadaan prasarana dan fasilitas yang ada di wilayah DIY dan perkotaan Yogyakarta. Prasarana dan fasilitas tersebut antara lain berupa sistem transportasi jalan, kereta api, bandar udara, fasilitas pendidikan, rumah sakit, fasilitas penunjang perekonomian/perdagangan, dan sebagainya. Di samping itu juga ditunjang dengan mudahnya akses masuk maupun ke luar dari Yogyakarta.

Dalam pola pemanfaatan lahan, hal menonjol pada saat ini adalah adanya perubahan penggunaan lahan. Wilayah yang mengalami tekanan cukup besar terhadap persawahan hingga berubah menjadi perkampungan adalah Kabupaten Sleman, diikuti Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan saat ini Pemerintah Propinsi DIY telah menyiapkan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya juga ditujukan untuk mewujudkan peran partisipatif pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab semua pihak.

Keperdulian terhadap keberlanjutan pembangunan diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Agenda 21, di antaranya adalah Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) yang merupakan program Agenda 21 Sektoral bidang Pariwisata di DIY.

Beberapa kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di antaranya adalah Program Kali Bersih (Prokasi), Program Langit Biru, dan sebagainya.

6. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan

a. Pertanian

Data luas panen tanaman pangan dan hortikultura (2002) pada Tabel 4.2:

No.	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Padi Sawah Maupun Padi Gogo	134.848
2	Kedelai	42.937
3	Ubi Kayu	59.182
4	Kacang Tanah	61.713
5	Jagung	62.309
6	Buah-Buahan	23.038
7	Ubi Jalar	741
8	Sorghum	1.682
9	Kacang Hijau	752
10	Sayuran	13.190

Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta <i>Area of Wetland and Dryland by Regency/City in D.I. Yogyakarta</i> <i>Province(hektar/hectares)</i> 1997 – 2004			
Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Luas Lahan/Land Area		Jumlah/ <i>Total</i>
	Sawah/ <i>Wetland</i>	Bukan Sawah/ <i>Dryland</i>	
1.Kulonprogo	10,867	47,760	58,627
2.Bantul	16,079	34,606	50,685
3.Gunungkidul	7,727	140,809	148,536
4.Sleman	23,255	34,227	57,482
5.Yogyakarta	122	3,128	3,250
Propinsi DIY/ <i>DIY Provinsi</i>	58,050	260.530	318.580
2003	58,210	260,370	318,580
2002	58,367	260,213	318,580
2001	58,608	259,972	318,580
2000	58,858	259,722	318,580
1999	59,742	258,838	318,580
1998	59,792	258,788	318,580
1997	60,110	258,470	318,580
Sumber : Daftar SP.V.A Dinas Pertanian Kab/Kota Propinsi D.I.Yogyakarta Source : Agriculture Survey-V.A.Regency/City of Agriculture Office D.I. Yogyakarta Province			

(Tabel 4.3 Luas Sawah dan Bukan Sawah Pemerintah Provinsi DIY)

b. Kehutanan dan Perkebunan

Hutan di Propinsi DIY adalah terdiri dari Hutan Negara seluas 17.064,364 hektar (5,36 %) dari luas wilayah DIY. (Tabel 4.4)

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)	
1	Hutan Negara		17.064,364
S e	a. Hutan Lindung	3791,30	
	b. Hutan Produksi	12888,10	
	c.Hutan konservasi	465,02	
2	Hutan rakyat aktual		34.494
3	Potensial		104.634

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, paradigma pembangunan kehutanan di Propinsi DIY adalah *domestic resources based (community and resource based development)*, yaitu:

- (1) Menetapkan sumberdaya hutan dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yakni ekonomi, ekologi dan sosial; dan
- (2) Memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberi peluang yang luas kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan menengah. yang berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari, demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan usaha perkebunan rakyat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan mendorong berkembangnya agribisnis perkebunan yang berdaya saing, melalui pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir.

c. Perikanan dan Kelautan

Secara umum pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan belum optimal. Pada tahun 2001, pemanfaatan potensi baru 9.0 % yaitu dengan tercapainya produksi ikan konsumsi sebesar 6.618,6 ton/ekor atau menurun 3.62 % dari produksi tahun 2000 sebesar 6.935,30 ton/ekor.

Tingkat pemanfaatan potensi produksi dan lahan masih relatif rendah (24.47 %), sehingga kemungkinan pengembangannya untuk peningkatan produksi perikanan masih cukup besar. Sebagai penunjang dari kegiatan budidaya ikan baik laut, payau maupun tawar adalah ketersediaan benih ikan dalam jumlah, mutu, waktu dan ukuran yang memadai.

Jumlah nelayan meningkat sebanyak 21,19 %. Armada perikanan naik sebanyak 55,70 %. Kegiatan penangkapan ikan ini masih didominasi oleh penangkapan ikan pantai sehingga ikan lepas pantai dan samudera belum tergarap.

Produksi ikan konsumsi menurun rata-rata 2,41 % per tahun, produksi benih ikan/udang meningkat 56,72 % per tahun, ikan hias 53,31 % per tahun. Konsumsi ikan rata-rata selama 5 tahun mengalami kenaikan sebesar 0,84 % per tahun.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumbangan bagi pemerintah daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi, efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini data yang didapat adalah data Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 serta biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

A. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kegiatan pemungutan PAD dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah juga berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, dapat diketahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan daerah. Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.1

**Peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2004-2008**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2004	347.393.879.443	645.607.351.382	53,80
2005	401.912.337.894	699.579.306.215	57,45
2006	436.497.274.576	881.160.029.574	49,53
2007	480.181.759.200	967.870.747.520	49,61
2008	632.872.311.670	1.258.609.946.423	50,28
Rata-rata			52,13

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY

Dari table 5.1 di atas dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan

yang cukup besar pada tahun anggaran 2008 yakni sebesar Rp152.690.552.470,00 senada dengan PAD, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008, kontribusi PAD berkisar antara 49,53% sampai 57,45%.

- a. Pada tahun anggaran 2004 PAD memberikan kontribusi sebesar 53,80% terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 3,65% sehingga kontribusi PAD pada tahun 2005 meningkat dari 53,80% menjadi 57,45% sejalan dengan peningkatan realisasi PAD.
- b. Peningkatan jumlah pendapatan daerah dan realisasi PAD pun terjadi pada tahun anggaran 2005. Hal ini menyebabkan meningkatnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD, dan pada tahun anggaran 2005 ini merupakan kontribusi PAD yang terbesar selama 5 tahun yakni sebesar 57,45%.
- c. Keadaan berbeda terjadi pada tahun anggaran 2006, dimana pada tahun anggaran ini pendapatan daerah dan juga realisasi PAD mengalami kenaikan namun kontribusi PAD malah mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. Kontribusi PAD mengalami penurunan sebesar 7,92% yakni dari 57,45% menjadi 49,53% dan ini merupakan kontribusi PAD yang terkecil selama 5 tahun.
- d. Pada tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya realisasi PAD sebesar Rp43.684.484.624,00 dan diikuti dengan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp86.710.717.946,00 sehingga kontribusi PAD juga sedikit meningkat

sebesar 0,08% yakni pada tahun anggaran sebelumnya 49,53% meningkat menjadi 49,61%. Keadaan serupa terjadi pula pada tahun anggaran 2008, dimana kontribusi PAD mengalami peningkatan sebesar 0,67% yakni dari 49,61% menjadi 50,28%. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp290.739.198.903,00 dan realisasi PAD pun meningkat sebesar Rp152.690.552.470,00.

- e. Rata-rata kontribusi yang diberikan PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 adalah sebesar 52,13%. Dengan demikian PAD yang di pungut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kontribusi yang tergolong cukup besar terhadap pendapatan daerah.

B. Analisis Efektivitas dan Efisiensi PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan PAD pada suatu daerah digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli Daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut

(target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah semakin efektif.

- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli Daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Mardiasmo, 2002: 129).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.2
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2004	347.393.879.443	303.353.566.475	114,52	Efektif
2005	401.912.337.894	373.889.939.911	107,49	Efektif
2006	436.497.274.576	368.522.643.044	118,45	Efektif
2007	480.181.759.200	420.568.426.068	114,17	Efektif
2008	632.872.311.670	547.887.175.315	115,51	Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa efektivitas selama 5 tahun yang diteliti yaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100%, hal ini disebabkan karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang artinya kemampuan daerah Provinsi DIY dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif. Walaupun pada tahun 2005 dan 2007 mengalami penurunan, namun tidak sampai dibawah 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang direalisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas sebesar 114,52% pada tahun anggaran 2004 mempunyai arti yakni dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp303.353.566.475,00 dapat tercapai melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp347.393.879.443,00 atau sebesar 114,52% dari target yang telah ditetapkan. Rasio 114,52% ini sendiri mempunyai arti, dari target yang ingin dicapai sebesar Rp 1,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1,14,-.

- a. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2004 dapat mencapai target yang telah di tetapkan. Dari target PAD sebesar Rp303.353.566.475,00 dapat direalisasikan sebesar Rp347.393.879.443,00 atau 114,53% sehingga terdapat selisih sebesar Rp44.040.312.968,00. Pada tahun anggaran 2004 ini rasio efektivitas tergolong efektif karena rasionya di atas 100%.

- b. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2005 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp373.889.939.911,00 dapat direalisasikan sebesar Rp401.912.337.894,00 atau 107,49%. Walaupun pada tahun anggaran 2005 ini rasio efektivitasnya cenderung mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya (tahun 2004), yakni dari 114,52% menjadi 107,49% namun rasionya masih tetap tergolong efektif karena lebih dari 100%.
- c. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2006 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp368.522.643.044,00 dapat direalisasikan sebesar Rp436.497.274.576,00 atau 118,45%. Pada tahun ini rasio efektivitas PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 118,45% menunjukkan tingkat kemampuan efektivitas yang baik, dimana pada tahun ini efektivitasnya semakin meningkat yaitu dari 107,49% pada tahun 2005 menjadi 118,45% pada tahun 2006 atau mengalami peningkatan sebesar 10,96%. Pada tahun anggaran 2006 rasio efektivitas sebesar 118,45% merupakan rasio efektivitas tertinggi dibandingkan dari empat tahun lainnya, hal ini juga disebabkan karena selisih lebihnya yang cukup besar yaitu sebesar Rp69.974.631.532,00.
- d. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2007 juga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp420.568.426.068,00 dapat direalisasikan sebesar Rp480.181.759.200,00 atau 114,17%. Pada tahun anggaran 2007 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 4,28%, yakni pada tahun 2006

sebesar 118,45% turun menjadi 114,17% pada tahun 2007. Namun rasio efektivitasnya masih tergolong efektif karena lebih dari 100%.

- e. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008 tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target PAD tahun ini sebesar Rp547.887.175.315,00 dapat direalisasikan sebesar 115,51% sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp84.985.136.355,00. Rasio efektivitas pada tahun anggaran 2008 ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,34% yaitu dari tahun 2007 sebesar 114,17% meningkat menjadi 115,51% pada tahun 2008. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Provinsi DIY dari 5 tahun anggaran yang diteliti ini, yakni tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 semakin baik dalam merealisasikan PAD, berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merealisasikan PAD bisa terwujud dengan baik.

2) Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria efisiensi yang dipakai adalah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DIY No.8 tahun 2005 Bab XXI Pasal 32, yakni sebesar 5% dari realisasi PAD.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pendapatan Asli Daerah, penentuan

besarnya pungutan yang terutang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyeterannya.

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan.

Dari hasil perhitungan rasio tingkat efisiensi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD efisien.
- b) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio yakni sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

Untuk melihat efisiensi Biaya Pemungutan PAD dapat ditunjukkan melalui rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.3
Biaya Pemungutan dan Realisasi PAD Provinsi DIY
Tahun Anggaran 2004-2008

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2004	16.466.470.920	347.393.879.443	4,74 %	Efisien
2005	19.693.704.550	401.912.337.894	4,90 %	Efisien
2006	20.285.292.170	436.497.274.576	4,64 %	Efisien
2007	22.683.542.484	480.181.759.200	4,72 %	Efisien
2008	28.605.828.487	632.872.311.670	4.52 %	Efisien

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY.

Tabel 5.3 diatas menunjukkan biaya pemungutan PAD pemerintah Provinsi DIY yang sudah cukup baik, karena rasio efisiensinya hanya berkisar antara 4,90% sampai dengan 4,52%. Artinya rasio efisiensi sebesar 4,90% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DIY pada tahun anggaran 2005 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp347.393.879.443,00 adalah sebesar 4,90% atau Rp19.693.704.550,00 dari realisasi PAD yang didapat. Rasio sebesar 4,90% mempunyai arti, untuk mendapatkan realisasi PAD sebesar Rp 1,- biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 0.049,-.

Terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya semakin tidak mendekati 100%. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan efisiensi yang menunjukkan tingkat efisiensi semakin tahun semakin baik. Walaupun pada tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2007 rasio efisiensi sempat mengalami peningkatan, namun pada tahun anggaran berikutnya nilai rasio efisiensi kembali mengalami penurunan hingga 4,52% pada tahun anggaran 2008.

Selama lima tahun anggaran (tahun 2004-2008) biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang harus dikeluarkan memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut tidak

mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah juga meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2005 rasio efisiensi sebesar 4,90%. Pada tahun ini biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp19.693.704.550,00 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah adalah sebesar Rp401.912.337.894,00.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 berkisar antara 49,53% sampai dengan 57,45% dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,13%. Tahun 2004 kontribusinya sebesar 53,80%, tahun 2005 sebesar 57,45%, tahun 2006 sebesar 49,53%, tahun 2007 sebesar 49,61%, dan tahun 2008 sebesar 50,28%. Setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY cenderung mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar dan pada tahun 2006 sempat mengalami penurunan sebesar 7,92% karena pada saat itu terjadi gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun pada tahun berikutnya kontribusi PAD kembali mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.
2. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun yang diteliti yaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100%, hal ini disebabkan karena realisasi

Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berarti kemampuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif. Pada tahun 2004 tingkat efektivitasnya sebesar 114,52%, tahun 2005 sebesar 107,49%, tahun 2006 sebesar 118,45%, tahun 2007 sebesar 114,17%, dan tahun 2008 tingkat efektivitasnya sebesar 115,51%. Setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY pada tahun 2004 sebesar 4,74%, tahun 2005 sebesar 4,90%, tahun 2006 sebesar 4,64%, tahun 2007 sebesar 4,72%, dan tahun 2008 rasio efisiensinya sebesar 4,52%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY dari tahun ke tahun semakin efisien karena rasio efisiensinya dibawah 5%. Walaupun setiap tahunnya biaya pemungutan mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

B. Keterbatasan Penelitian

Untuk mengetahui batasan tingkat efektivitas, penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli mengenai tingkat

efektivitas dan efisiensi. Bila kontribusi yang diberikan (realisasi) terhadap sasaran (target) meningkat maka dapat dikatakan efektif, dan apabila realisasi pendapatan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan maka dapat dikatakan efisien.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Untuk meningkatkan kontribusi PAD diharapkan dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Untuk dapat meningkatkan efektivitas PAD diharapkan pemerintah dapat lebih meningkatkan pengawasan agar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat disesuaikan bahkan dapat lebih melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi PAD sebaiknya Pemerintah Provinsi DIY dapat lebih menunjukkan biaya pemungutan PAD secara lebih spesifik, yaitu dengan cara memberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak menyulitkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai efisiensi keuangan daerah. Pemerintah juga sebaiknya lebih dapat menetapkan standar efektivitas yang jelas untuk performa kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama, sebaiknya menambah jumlah tahun penelitian dan menggunakan analisis least square untuk dapat mengetahui perkembangan efektivitas dan efisiensi tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony-Dearden-Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen 1*. Terjemahan. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Bais, Yasinta Dolvina. 2003. Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Dearah Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur). *Skripsi* .Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Darise, Nurian. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo : PT. Indeks.
- Fauzan, Dr. Muhammad, SH, M.Hum. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Hartono, Septawulandari. 2001. *Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Surabaya: Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi.
- Munir, Bahdrul. 2003. *Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Samawa Center.
- Mardiasmo . 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Repbulik Indonesia.
- , 2005. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 8, Pasal 32 Tahun 2005 tentang Biaya Pemungutan.
- , 2000. Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

-----, 2000. Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Radiyo, Thomas. 2005. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten bangka. *Skripsi* . Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Soeratno dan Soedarto. 2000. Lingkungan Taman Wisata Budaya Candi Borobudur Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang. *Telaah Bisnis*. Vol. 01, No. 02, hal 87-97.

Ulum, Ihyaul. 2006. Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi Dengan PAD Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 07, No. 01. hal. 1-22.

www.pemprovdiy.com

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4737.

Membaca Surat : Dekan Fak Ekonomi USD Yogyakarta. Nomor : 31/Kaprodi Akt/504/X/2009.
 Tanggal Surat : 19 Oktober 2009. Perihal : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : VINCENTIA PUTRI KUSUMASTUTI. NIM/NIP : 052114094.

Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta.

Judul Penelitian : ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

L o k a s i : Yogyakarta.

Waktu : Mulai Tanggal 19 Oktober 2009 s/d 19 Januari 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2009

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 UB

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY.
3. Dekan Fak Ekonomi USD Yogyakarta.
4. Yang Bersangkutan.



J. SURAT DJUMADAL

NIP. 19560403 198209 1 001

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2004 - 2010

ODI REK	URAIAN	TARGET 2004	REALISASI 2004	NAIKTURUN	%	TARGET 2005	REALISASI 2005	NAIKTURUN	%	TARGET 2006	REALISASI 2006	NAIKTURUN	%
	PENDAPATAN	595.142.636.889,31	645.607.351.381,54	50.464.714.493,23	8,48	655.366.027.225,40	695.579.306.215,16	34.213.276.989,78	5,14	811.602.007.161,72	881.160.029.573,62	69.558.022.421,90	8,57
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.353.566.474,50	347.393.879.442,54	44.040.312.968,04	14,52	373.889.939.911,36	401.912.337.894,18	28.022.397.962,82	7,49	358.522.643.044,43	436.497.274.575,62	87.974.631.531,19	18,45
1.1	Pajak Daerah	263.860.908.965,10	307.572.364.672,00	43.591.455.706,90	16,51	338.866.932.998,36	380.119.683.754,00	21.252.730.765,64	6,27	327.375.549.000,00	374.578.524.388,00	47.202.975.388,00	14,42
1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	103.300.000.000,00	117.050.212.225,00	13.750.212.225,00	13,31	130.059.012.000,00	149.291.828.965,00	19.232.816.965,00	14,79	138.123.360.000,00	171.146.972.390,00	33.023.612.390,00	23,91
1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	121.000.000.000,00	143.802.144.000,00	24.802.144.000,00	20,50	164.757.718.700,00	154.710.634.950,00	-10.047.083.750,00	-6,10	103.867.319.000,00	115.544.048.150,00	11.676.728.150,00	11,24
1.1.05	Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor	37.707.957.811,00	43.528.159.271,00	4.820.201.460,00	12,78	41.850.202.298,36	53.914.945.004,00	12.064.742.705,64	28,83	83.678.870.000,00	85.805.843.816,00	2.126.973.816,00	2,54
1.1.06	Pajak Pengambilan dan Pemantauan ABT- AP	1.972.951.154,10	2.191.849.176,00	218.898.021,90	11,09	2.200.000.000,00	2.202.254.895,00	2.254.895,00	0,10	1.705.000.000,00	2.081.650.000,00	375.650.000,00	22,02
1.2	Retribusi Daerah	10.337.749.820,00	13.414.655.958,00	77.106.138,00	0,75	10.020.178.208,00	11.940.416.425,00	1.920.238.221,00	19,16	11.745.727.282,00	12.454.919.866,00	709.192.584,00	6,04
1.2.01	Retribusi Jasa Umum												
1.2.02	Retribusi Jasa Usaha												
1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu												
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	13.742.981.692,40	13.813.593.719,04	70.602.026,64	0,51	12.358.409.005,00	11.655.586.426,07	-488.822.578,93	-4,04	12.289.634.962,43	11.217.078.313,10	-1.072.566.649,33	-8,80
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.291.925.997,00	15.593.075.093,50	301.149.096,50	1,97	12.644.418.700,00	17.992.671.285,11	5.348.252.585,11	42,30	17.101.731.800,00	38.246.752.006,52	21.145.020.206,52	123,64
2	DANA PERIMBANGAN	276.844.070.419,81	283.268.471.939,00	6.424.401.525,19	2,32	271.047.087.314,04	277.237.988.321,00	6.190.861.006,96	2,28	441.562.452.507,29	442.882.531.846,00	1.320.079.340,71	0,30
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.795.070.419,81	35.219.471.939,00	6.424.401.525,19	22,31	32.355.087.314,04	38.545.988.321,00	6.190.861.006,96	19,13	39.078.452.507,29	40.398.531.846,00	1.320.079.340,71	3,38
2.2	Dana Alokasi Umum	248.049.000.000,00	248.049.000.000,00	0,00	0,00	238.892.000.000,00	238.692.000.000,00	0,00	0,00	402.484.000.000,00	402.484.000.000,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus												
	Dana Penyesuaian												
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.945.000.000,00	14.945.000.000,00	0,00	0,00	20.429.000.000,00	20.429.000.000,00	0,00	0,00	1.516.911.600,00	1.780.223.150,00	263.311.550,00	17,36

TARGET 2007	REALISASI 2007	NAIK/TURUN	%	TARGET 2008	REALISASI 2008	NAIK/TURUN	%	TARGET 2009	TARGET 2010
911.558.526.278,00	967.870.747.519,50	56.312.221.241,50	6,18	1.161.966.630.223,42	1.258.609.946.423,39	96.623.316.199,97	8,32	1.221.594.140.781,42	1.233.029.107.963,00
420.568.426.068,00	480.181.759.199,50	59.613.333.131,50	14,17	547.887.175.315,00	632.872.311.670,13	84.985.136.355,13	15,51	596.850.701.653,00	597.523.230.485,00
378.916.438.850,00	434.898.894.141,00	55.982.455.291,00	14,77	486.168.175.841,00	525.185.354.193,35	39.017.176.352,35	8,03	524.567.434.500,00	512.321.439.320,00
171.324.990.700,00	199.659.041.270,00	28.334.050.570,00	16,54	208.414.628.000,00	222.136.390.300,00	13.721.762.300,00	6,58	225.530.625.000,00	237.743.503.460,00
115.544.692.150,00	142.987.677.700,00	27.442.985.550,00	23,75	169.530.376.000,00	190.932.195.150,00	21.401.819.150,00	12,62	177.443.000.000,00	171.386.477.360,00
90.046.756.000,00	89.940.087.066,00	-106.668.934,00	-0,12	106.023.171.841,00	109.829.732.718,35	3.806.560.877,35	3,59	119.204.232.000,00	100.801.881.000,00
2.000.000.000,00	2.312.088.105,00	312.088.105,00	15,60	2.200.000.000,00	2.287.036.025,00	87.036.025,00	3,96	2.389.577.500,00	2.389.577.500,00
14.722.357.478,00	17.563.425.637,00	2.841.068.159,00	19,30	33.144.872.640,00	29.259.898.291,50	-3.884.974.348,50	-11,72	32.935.363.765,00	35.564.457.350,00
4.271.470.228,00	4.949.197.674,00	677.727.446,00	15,87	22.033.176.240,00	17.870.392.661,50	-4.162.783.578,50	-18,89	21.450.194.435,00	23.894.581.400,00
7.796.589.250,00	8.817.710.738,00	1.021.121.488,00	13,10	8.354.149.900,00	8.577.471.580,00	223.321.680,00	2,67	8.761.831.350,00	9.241.442.950,00
2.654.298.000,00	2.815.346.500,00	161.048.500,00	6,07	2.757.546.500,00	2.812.034.050,00	54.487.550,00	1,98	2.723.338.000,00	2.428.433.000,00
12.371.829.740,00	11.927.811.593,02	-444.218.146,98	-3,59	12.768.526.834,00	12.481.050.738,67	-287.476.095,33	-2,25	14.071.903.368,00	24.576.333.815,00
14.657.800.000,00	15.791.827.828,48	1.234.027.828,48	8,48	15.805.600.000,00	65.946.008.446,61	50.140.408.446,61	317,23	25.276.000.000,00	25.061.000.000,00
488.667.515.010,00	480.922.834.904,00	-7.744.680.106,00	-1,58	590.574.676.643,42	602.117.047.488,00	11.542.370.844,58	1,95	618.381.981.128,42	631.449.161.478,00
51.288.515.010,00	43.543.834.904,00	-7.744.680.106,00	-15,10	59.333.281.643,42	70.560.773.088,00	11.227.491.444,58	18,92	61.052.031.128,42	74.119.201.478,00
437.379.000.000,00	437.379.000.000,00	0,00	0,00	511.773.395.000,00	511.773.394.400,00	-600,00	0,00	523.919.950.000,00	523.919.950.000,00
				19.468.000.000,00	19.468.000.000,00	0,00	0,00	33.410.000.000,00	33.410.000.000,00
				314.880.000,00	314.880.000,00				
2.322.585.200,00	6.766.153.416,00	4.443.568.216,00	191,32	23.524.778.265,00	23.820.587.265,26	95.809.000,26	0,41	6.361.458.000,00	4.056.726.000,00

DATA BIAYA PEMUNGUTAN TAHUN 2005

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan
1.1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG		PROSEN TASE	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
				RUPIAH	TASE					
1	2									
2 01 02 00 2 1 10	1 Uang Lembur	241.141.500,00	196.391.000,00	(44.750.500,00)	(18,56)			25.177.500,00	22.260.000,00	(2.917.500,00)
2 01 02 00 2 1 10 02	1 Uang Lembur Harian	241.141.500,00	196.391.000,00	(44.750.500,00)	(18,56)		- Uang lembur harian (Biro Pemerintahan) - Uang lembur harian (Biro Hukum) - Uang lembur harian (Biro Kerjasama) - Uang lembur harian (Biro Organisasi) - Uang lembur harian (Biro Umum) - Uang lembur harian (Biro Kepegawaian)	14.092.500,00 10.150.000,00 59.057.500,00 20.865.000,00 71.769.000,00	9.865.500,00 10.120.000,00 75.771.000,00 14.590.000,00 63.404.500,00	(4.207.000,00) (90.000,00) (23.286.500,00) (5.945.000,00) (8.364.500,00)
		241.141.500,00	196.391.000,00	(44.750.500,00)	(18,56)		-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPMU Rp Jumlah SPJ Rp SISA UUDP Rp	241.141.500,00	196.391.000,00	(44.750.500,00)
2 01 02 00 2 1 11	1 Uang Perangasng Jissentif dan Upah Pungat	4.891.500,00	4.891.500,00					4.891.500,00	4.891.500,00	
2 01 02 00 2 1 11 02	1 Upah Pungat Peatrbaui Daerah	4.891.500,00	4.891.500,00				- Biaya upah pungat retribusi daerah (Biro Umum)	4.891.500,00	4.891.500,00	
		4.891.500,00	4.891.500,00				-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPMU Rp Jumlah SPJ Rp SISA UUDP Rp	4.891.500,00	4.891.500,00	
2 01 02 00 2 1 12	1 Uang Bantuan Penghargaan	112.600.000,00	112.400.000,00	(200.000,00)	(0,18)			5.000.000,00	5.000.000,00	
2 01 02 00 2 1 12 01	1 Uang Bantuan Penghargaan	112.600.000,00	112.400.000,00	(200.000,00)	(0,18)		- Stimulan kepada pemerintah Desa/Kelurahan (Biro Pem-an) - Stimulan kepada pemenang lomba Desa/Kelurahan(Biro Pem-an) - Biaya bantuan penghargaan (Biro Kepegawaian)	39.000.000,00 66.600.000,00 112.600.000,00	39.000.000,00 66.400.000,00 112.400.000,00	(200.000,00) (200.000,00)
		112.600.000,00	112.400.000,00	(200.000,00)	(0,18)		-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPMU Rp Jumlah SPJ Rp SISA UUDP Rp	112.600.000,00	112.600.000,00	(200.000,00)

1.2 Badan Pengelaaan Keuangan Daerah

156

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBJEK	JML ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG		PROSEK	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG
				RUPAH	TASE					
2 01 04 00 2 1 09 2	Honorarium / Upah	255.064.400,00	249.602.814,60	(5.461.585,40)	(2,14)	Honorarium TimPania		255.064.400,00	249.602.814,60	(5.461.585,40)
2 01 04 00 2 1 09 01 2	Honorarium / Upah	255.064.400,00	249.602.814,60	(5.461.585,40)	(2,14)	-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp	Jumlah SPMU Rp 255.064.400,00 Jumlah SPJ Rp 249.602.814,60 SISA LUUDP Rp 5.461.585,40			
2 01 04 00 2 1 10 2	Uang Lembur	15.337.500,00	14.097.500,00	(1.240.000,00)	(8,08)	Uang Lembur Harian		15.337.500,00	14.097.500,00	(1.240.000,00)
2 01 04 00 2 1 10 02 2	Uang Lembur Harian	15.337.500,00	14.097.500,00	(1.240.000,00)	(8,08)	-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp	Jumlah SPMU Rp 15.337.500,00 Jumlah SPJ Rp 14.097.500,00 SISA LUUDP Rp 1.240.000,00			
2 01 04 00 2 1 11 2	Uang Penangasng/Insentif dan Upah Prngut	19.357.943.007,00	19.122.919.421,00	(235.023.586,00)	(1,21)	Upah Prngut Pajak Daerah		19.122.919.421,00	19.122.919.421,00	(31.965.185,00)
2 01 04 00 2 1 11 01 2	Upah Prngut Pajak	19.122.919.421,00	19.122.919.421,00	(31.965.185,00)	(100,00)	Upah Prngut Retribusi Daerah		31.965.185,00	31.965.185,00	(203.058.401,00)
2 01 04 00 2 1 11 02 2	Upah Prngut Retribusi	31.965.185,00				Upah Prngut Pendapatan lain-lain		203.058.401,00	19.122.919.421,00	(235.023.586,00)
2 01 04 00 2 1 11 03 2	Upah Prngut Pendapatan lain-lain	203.058.401,00				-SPMU BT : Rp -SPMU PK : Rp -SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp	Jumlah SPMU Rp ##### Jumlah SPJ Rp 19.122.919.421,00 SISA LUUDP Rp 235.023.587,00			

1.3 Kantor Perwakilan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai.

210

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG		KETERANGAN					
				RUPAH	PROSEN TASE	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG		
2 01 09 00 1 4 17	1 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-						10
2 01 09 00 1 4 17 01	1 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian	21.500.000,00	21.500.000,00			- Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-	
						-SPMU BT : Rp					
						-SPMU PK : Rp	21.500.000,00				
						Jumlah SPMU Rp	21.500.000,00				
						*SPJ BT : Rp					
						*SPJ PK : Rp	21.500.000,00				
						Jumlah SPJ Rp	21.500.000,00				
						SISA UUDF Rp	-				
2 01 09 00 1 4 18	1 Belanja Pemeliharaan hewan, ternak dan ikan dan tanaman	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-						
2 01 09 00 1 4 18 02	1 Belanja Pemeliharaan hewan, ternak dan ikan	2.400.000,00	2.400.000,00			- Belanja Pemeliharaan hewan, ternak dan ikan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
						-SPMU BT : Rp					
						-SPMU PK : Rp	2.400.000,00				
						Jumlah SPMU Rp	2.400.000,00				
						*SPJ BT : Rp					
						*SPJ PK : Rp	2.400.000,00				
						Jumlah SPJ Rp	2.400.000,00				
						SISA UUDF Rp	-				
2 01 09 00 2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-						
2 01 09 00 2 1	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-						
2 01 09 00 2 1 12	Uang Perangsan/ Insentif dan Upah Pungut	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-						
2 01 09 00 2 1 12 02	1 Upah Pungut Reihuis Daerah	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-	- Uang perangsan/insentif 5 % x Rp. 35.753.000,-	1.787.500,00	1.787.500,00	1.787.500,00	-	
						-SPMU BT : Rp					
						-SPMU PK : Rp	1.787.500,00				
						Jumlah SPMU Rp	1.787.500,00				
						*SPJ BT : Rp					
						*SPJ PK : Rp	1.787.500,00				
						Jumlah SPJ Rp	1.787.500,00				
						SISA UUDF Rp	-				

2. Bidang Pertanian
2.1 Dinas Pertanian

272

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JML. REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH / BERKURANG
				RUPIAH	PROSEN TASE				
1	2								
2 02 01 02 2 1 09 2	Honorarium/Upah	207,140,250.00	207,130,875.00	-3,375.00	(0.00)		207,140,250.00	207,130,875.00	(9,375.00)
2 02 01 02 2 1 09 02 2	Upah	207,140,250.00	207,130,875.00	(9,375.00)	(0.00)	- Biaya upah			
						-SPMAU BT : Rp -SPMAU PK : Rp Jumlah SPMAU Rp 207,140,250.00			
						-SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPJ Rp 207,130,875.00			
						Jumlah SPJ Rp 207,130,875.00			
						SISA UUDP Rp 9,375.00			
2 02 01 02 2 1 10 2	Uang Lembur	1,425,000.00	1,425,000.00	-	-		1,425,000.00	1,425,000.00	
2 02 01 02 2 1 10 02 2	Uang Lembur Harian	1,425,000.00	1,425,000.00	-	-				
						-SPMAU BT : Rp -SPMAU PK : Rp Jumlah SPMAU Rp 1,425,000.00			
						-SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPJ Rp 1,425,000.00			
						SISA UUDP Rp -			
2 02 01 02 2 1 11 2	Uang Perangsang/ Insentif dan Upah Pungjut	11,838,800.00	11,838,800.00	-	-		11,838,800.00	11,838,800.00	
2 02 01 02 2 1 11 02 2	Uang Pungjut Retribusi Daerah	11,838,800.00	11,838,800.00	-	-				
						-SPMAU BT : Rp -SPMAU PK : Rp Jumlah SPMAU Rp 11,838,800.00			
						-SPJ BT : Rp -SPJ PK : Rp Jumlah SPJ Rp 11,838,800.00			
						SISA UUDP Rp -			
2 02 01 02 2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,220,850.00	104,900,475.00	(2,320,375.00)	(2.16)				
2 02 01 02 2 2 01 2	Biaya Bahan/ Material	71,357,000.00	69,961,600.00	(1,395,400.00)	(1.96)				
2 02 01 02 2 2 01 02 2	Biaya bahan/bibit	7,168,500.00	6,798,500.00	(369,999.99)	(5.16)		7,168,500.00	6,798,500.00	(369,999.99)
2 02 01 02 2 2 01 02 2	Biaya Bahan Obat-obatan	32,752,000.00	32,492,000.00	(260,000.00)	(0.79)		32,752,000.00	32,492,000.00	(260,000.00)
2 02 01 02 2 2 01 05 2	Biaya Bahan Percontohan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-		1,500,000.00	1,500,000.00	
2 02 01 02 2 2 01 07 2	Biaya pembelian alat-alat/perengkapan.	29,916,500.00	29,171,100.00	(745,400.00)	(2.49)		29,916,500.00	29,171,100.00	(745,400.00)
						- Biaya pembelian bibit			
						- Biaya pembelian obat-obatan			
						- Biaya pembelian bahan percontohan			
						- Biaya pembelian alat-alat/perengkapan.			
						Jumlah SPJ Rp 11,838,800.00			
						SISA UUDP Rp -			
							71,357,000.00	69,961,600.00	(1,395,400.00)

3. Bidang Perikanan dan Kelautan.
3.1 Dinas Perikanan dan Kelautan

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN CSEK	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMILAH REALISASI	BERLEHJ / BERKURANG RUJAH	PROSEN TASE	K E T E R A N G A N			
						URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEHJ / BERKURANG
2 03 01 01 2 1 10	2 Ulang Lembur	6.210.000,00	3.832.500,00	(2.377.500,00)	(38,29)	-SPJ BT : Rp -SPJ FK : Rp Jumlah SFJ Rp 22.890.000,00 SISA UUDP Rp 15.000,00	6.210.000,00	3.832.500,00	(2.377.500,00)
2 03 01 01 2 1 10 02	2 Ulang Lembur Hancur	6.210.000,00	3.832.500,00	(2.377.500,00)	(38,29)	Ulang lembur	6.210.000,00	3.832.500,00	(2.377.500,00)
2 03 01 01 2 1 11	2 Ulang Perangas/Insentif dan Ulang Pungut	40.169.530,00	38.807.260,00	(1.362.270,00)	(3,39)	-SPMU BT : Rp -SPMU FK : Rp Jumlah SPMU Rp 6.210.000,00 SISA UUDP Rp 2.377.500,00	40.169.530,00	38.807.260,00	(1.362.270,00)
2 03 01 01 2 1 11 02	2 Ulang Pungut Peribus Dierah	34.805.480,00	33.898.860,00	(906.620,00)	(2,61)	Ulang pungut netibus dierah (5 % x Rp 349.999,000,00)	34.805.480,00	33.898.860,00	(906.620,00)
2 03 01 01 2 1 11 03	2 Ulang Pungut Pendapatan Lain-Lain	5.364.050,00	4.908.700,00	(455.350,00)	(8,49)	Ulang pungut pendapatan lain-lain (5 % x Rp 58.350.000,00)	5.364.050,00 40.169.530,00	4.908.700,00 38.807.260,00	(455.350,00) (1.362.270,00)
2 03 01 01 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	296.160.500,00	296.160.500,00	(4.398.000,00)	(1,49)	-SPMU BT : Rp -SPMU FK : Rp Jumlah SPMU Rp 40.169.530,00	296.160.500,00	296.160.500,00	(4.398.000,00)
2 03 01 01 2 2 01	2 Biaya Bahan/Material	64.419.000,00	64.419.000,00	(440.000,00)	(0,62)	-SPMU BT : Rp -SPMU FK : Rp Jumlah SPMU Rp 38.807.260,00 SISA UUDP Rp 1.362.270,00	64.419.000,00	64.419.000,00	(440.000,00)
2 03 01 01 2 2 01 02	2 Biaya Bahan/Bibit	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	Biaya pembelian bahan/bibit	6.900.000,00	6.900.000,00	-
2 03 01 01 2 2 01 03	2 Biaya Bahan Obat-obatan	8.920.000,00	8.920.000,00	-	-	Biaya pembelian obat-obatan	8.920.000,00	8.920.000,00	-
2 03 01 01 2 2 01 04	2 Biaya Bahan Kimia	25.000.000,00	24.600.000,00	(400.000,00)	(1,60)	Biaya pembelian bahan kimia	25.000.000,00	24.600.000,00	(400.000,00)
2 03 01 01 2 2 01 05	2 Biaya Bahan Percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	Biaya pengadaan bahan percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2 03 01 01 2 2 01 07	2 Biaya pembelian alat-alat/perengkapan.	19.599.000,00	19.599.000,00	-	-	Biaya pembelian perlengkapan perikanan.	19.599.000,00	19.599.000,00	-
		64.419.000,00	64.419.000,00	-	-	-SPMU BT : Rp -SPMU FK : Rp Jumlah SPMU Rp 64.419.000,00	64.419.000,00	64.419.000,00	-

4. Bidang Kesehatan dan Perkebunan
4.1 Dinas Kesehatan dan Perkebunan

369

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BKRLH/BERKURANG RUPAH	PROSEN TASE	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 01 00 2 1 10	2 Uang Lembur	9.665.000,00	9.465.000,00	(199.000,00)	(2,06)	-	9.665.000,00	9.465.000,00	(199.000,00)
2 04 01 00 2 1 10 01	2 Uang Lembur Harian	9.665.000,00	9.465.000,00	(199.000,00)	(2,06)	SPJ BT : Rp SPJ PK : Rp Jumlah SPJ Rp 633.006.920,00 SISA UUDP Rp 8.539.680,00			
2 04 01 00 2 1 12	2 Uang Perangsang/insentif dan Upah Pungut.	4.104.800,00	4.104.000,00	(800,00)	(0,02)	-	4.104.800,00	4.104.000,00	(800,00)
2 04 01 00 2 1 12 01	2 Uang Perangsang/insentif.	4.104.800,00	4.104.000,00	(800,00)	(0,02)	SPMU BT : Rp SPMU PK : Rp Jumlah SPMU Rp 4.104.000,00	4.104.800,00	4.104.000,00	(800,00)
2 04 01 00 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	678.141.300,00	645.476.625,00	(32.664.675,00)	(4,82)	-	678.141.300,00	645.476.625,00	(32.664.675,00)
2 04 01 00 2 2 01	2 Biaya Bahan Material	413.384.900,00	392.503.150,00	(20.881.750,00)	(5,05)	-	413.384.900,00	392.503.150,00	(20.881.750,00)
2 04 01 00 2 2 01 01	2 Biaya bahan baku / bangunan	104.486.400,00	104.486.400,00	-	-	SPMU BT : Rp SPMU PK : Rp Jumlah SPMU Rp 4.104.000,00	104.486.400,00	104.486.400,00	-
2 04 01 00 2 2 01 02	2 Biaya bahan / bibit	216.676.000,00	199.602.950,00	(17.073.050,00)	(7,89)	-	216.676.000,00	199.602.950,00	(17.073.050,00)
2 04 01 00 2 2 01 05	2 Biaya Bahan Percontohan	24.700.000,00	21.358.800,00	(3.341.200,00)	(13,53)	-	24.700.000,00	21.358.800,00	(3.341.200,00)
2 04 01 00 2 2 01 06	2 Biaya Alat Tulis.	36.497.500,00	36.030.000,00	(467.500,00)	(1,28)	-	36.497.500,00	36.030.000,00	(467.500,00)
2 04 01 00 2 2 01 07	2 Biaya Pembelian Alat-Alat Perkebunan.	31.025.000,00	31.025.000,00	-	-	-	31.025.000,00	31.025.000,00	-
		413.384.900,00	392.503.150,00	(20.881.750,00)		Jumlah SPMU Rp 397.219.900,00	413.384.900,00	392.503.150,00	(20.881.750,00)

5. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.
5.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
5.1.1 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

435

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
				Rupiah	Person lase				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 05 0101 2 1 11	2 Uang Perangsang/Insentif dan upah pungut	1,206,250.00	1,206,000.00	(250.00)	(0.02)		1,206,250.00	1,206,000.00	(250.00)
2 05 0101 2 1 11 03	2 Uang Perangsang/Insentif	1,206,250.00	1,206,000.00	(250.00)	(0.02)	- Upah pungut pendapatan lain-lain - SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 1,206,250.00 1,206,250.00 - SPI BT : Rp 0.00 - SPI PK : Rp 1,206,000.00 1,206,000.00 SISA UUDP Rp 250.00	1,206,250.00	1,206,000.00	(250.00)
2 05 0101 2 1 12	2 Uang Bantuan Penghargaan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	- Biaya Pembelian Hadiah Lomba	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
2 05 0101 2 1 12 01	2 Uang Bantuan Penghargaan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 22,500,000.00 22,500,000.00 - SPI BT : Rp 0.00 - SPI PK : Rp 22,500,000.00 22,500,000.00 SISA UUDP Rp 0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
2 05 0101 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	365,399,000.00	304,359,505.00	(61,039,495.00)	(16.70)				
2 05 0101 2 2 01	2 Biaya Bahan Material	150,875,000.00	148,590,000.00	(2,285,000.00)	(1.51)				
2 05 0101 2 2 01 05	2 Biaya Bahan Percontohan	148,375,000.00	146,090,000.00	(2,285,000.00)	(1.54)	- Biaya Bahan Percontohan	148,375,000.00	146,090,000.00	(2,285,000.00)
2 05 0101 2 2 01 07	2 Biaya Pembelian Alat/Alat Perengkapan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	- Biaya Pembelian Alat/Alat Perengkapan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
		150,875,000.00	148,590,000.00	(2,285,000.00)	(1.54)		150,875,000.00	148,590,000.00	(2,285,000.00)

5.1.2 Balai Metrologi

460

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Berurang		KETERANGAN			
				Rupiah	Persen Tase	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05.0103.2.1.11	2.05.0103.2.1.11.02	4,961,565.00	4,961,565.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 2,750,000.00 Rp 2,750,000.00 SISA UUDP Rp 0.00	4,961,565.00	4,961,565.00	0.00
2.05.0103.2.1.11	2.05.0103.2.1.11.02	4,961,565.00	4,961,565.00	0.00	0.00	- Uang Pungut Retribusi Daerah - SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,961,565.00 4,961,565.00	4,961,565.00	4,961,565.00	0.00
2.05.0103.2.2	2.05.0103.2.2	40,196,295.00	39,256,000.00	(940,200.00)	(2.34)				
2.05.0103.2.2.01	2.05.0103.2.2.01	8,565,000.00	8,270,000.00	(295,000.00)	(3.44)				
2.05.0103.2.2.01	2.05.0103.2.2.01	8,565,050.00	8,270,000.00	(295,000.00)	(3.44)	Biaya Bahan Baku - SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 8,565,000.00 8,565,000.00	8,565,000.00	8,270,000.00	(295,000.00)
2.05.0103.2.2.02	2.05.0103.2.2.02	6,500,000.00	6,400,000.00	(100,000.00)	(1.54)				
2.05.0103.2.2.02	2.05.0103.2.2.02	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	- Biaya kalibrasi - SPMU BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 8,270,000.00 Rp 8,270,000.00 SISA UUDP Rp 295,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
2.05.0103.2.2.02	2.05.0103.2.2.02	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	(100.00)	- Biaya Dokumentasi	100,000.00	0.00	(100,000.00)

5.2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

472

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	Berlebih/berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG	
			RUPIAH	Persen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06 01002 1 11 02 2	Uang Perangsgang/Insentif dan Upah Pungut	1,859,475.00	1,859,475.00	0.00	0.00	1,859,475.00	1,859,475.00	0.00	
2 06 01002 1 11 02 2	Upah Pungut Retribusi Daerah	1,859,475.00	1,859,475.00	0.00	0.00	1,859,475.00	1,859,475.00	0.00	
					- Uang Perangsgang/Insentif - SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 1,859,475.00 1,859,475.00 - SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 1,859,475.00 Rp 1,859,475.00 SISA UUDD Rp 0.00				
2 06 01002 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,787,582,500.00	1,459,483,205.00	(328,099,195.00)	(18.35)				
2 06 01002 2 01	Biaya Bahan Material	186,946,000.00	183,677,210.00	(3,268,790.00)	(1.75)				
2 06 01002 2 01 03 2	Biaya Bahan Obat-obatan	11,480,500.00	11,323,350.00	(157,150.00)	(1.37)	- Biaya Bahan Obat-obatan	11,480,500.00	(157,150.00)	
2 06 01002 2 01 05 2	Biaya Bahan Percontohan	135,700,000.00	133,830,460.00	(1,869,540.00)	(1.38)	- Biaya Bahan Percontohan	135,700,000.00	(1,869,540.00)	
2 06 01002 2 01 06 2	Biaya Alat Tulis Kantor	39,765,500.00	38,523,400.00	(1,242,100.00)	(3.12)	- Biaya Alat Tulis Kantor	39,765,500.00	(1,242,100.00)	
						SISA UUDD Rp 0.00	186,349,460.00	(3,268,790.00)	
2 06 01002 2 02	Biaya Jasa Pihak Ketiga	446,780,000.00	414,577,545.00	(32,202,455.00)	(7.21)	- SPMU BT : Rp 109,353,460.00			
2 06 01002 2 02 03 2	Biaya Dokumentasi	8,700,000.00	8,450,000.00	(250,000.00)	(2.87)	- SPMU PK : Rp 76,996,000.00 186,349,460.00			
2 06 01002 2 02 04 2	Biaya Dekorasi	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 109,353,460.00 - SPJ PK : Rp 74,323,750.00 Rp 183,677,210.00 SISA UUDD Rp 2,672,250.00	8,450,000.00	(250,000.00)	
							2,700,000.00	0.00	
							8,700,000.00	(250,000.00)	
							2,700,000.00	0.00	

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
				RUPIAH	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06 0101 2 1 11 2	2 Uang Perangsang/Insentif dan Upah Pungut	3.158.550,00	3.158.550,00	0,00	0,00	- Uang Perangsang/Insentif	3.158.550,00	3.158.550,00	0,00
2 06 0101 2 1 11 02 2	2 Upah Pungut Retribusi Daerah	3.158.550,00	3.158.550,00	0,00	0,00	- SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 3.158.550,00	3.158.550,00	3.158.550,00	0,00
2 06 0101 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	89.950.000,00	85.445.425,00	(4.504.575,00)	(5,01)	- SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 3.158.550,00 SISA UUDP Rp 0,00			
2 06 0101 2 2 01 2	2 Biaya Bahan Material	80.750.000,00	76.386.025,00	(4.363.975,00)	(5,40)				
2 06 0101 2 2 01 03 2	2 Biaya Bahan Obat-obatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	- Biaya Bahan Obat-obatan Pelatihan	750.000,00	750.000,00	0,00
2 06 0101 2 2 01 05 2	2 Biaya Bahan Percontohan	75.000.000,00	70.636.025,00	(4.363.975,00)	(5,82)	- Biaya Bahan Latihan Kejuruan	75.000.000,00	70.636.025,00	(4.363.975,00)
2 06 0101 2 2 01 06 2	2 Biaya Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	- Biaya Alat Tulis Latihan kejuruan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
							80.750.000,00	76.386.025,00	(4.363.975,00)
						- SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 80.750.000,00	80.750.000,00		
						- SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 76.386.025,00 SISA UUDP Rp 4.363.975,00			

5.2.2 Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

499

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	Jumlah REALISASI	Berlebih/berkurang		KETERANGAN			
				RUPIAH	Persen tas.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06 0102 2 1 09 2	Honorarium/Upah	48,160,000.00	48,160,000.00	0.00	0.00	- Honorarium Pelatihan	48,160,000.00	48,160,000.00	0.00
2 06 0102 2 1 09 01 2	Honorarium/Upah	48,160,000.00	48,160,000.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 48,160,000.00	48,160,000.00		
2 06 0102 2 1 10 2	Uang Lembur	7,500,000.00	7,497,500.00	(2,500.00)	(0.03)	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 48,160,000.00 SISA UUDP Rp 0.00			
2 06 0102 2 1 10 02 2	Uang Lembur Harian	7,500,000.00	7,497,500.00	(2,500.00)	(0.03)	- Biaya Lembur	7,500,000.00	7,497,500.00	(2,500.00)
2 06 0102 2 1 11 2	Uang Perangang/Insentif dan Upah Pungut	4,722,750.00	4,722,750.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 7,500,000.00	7,500,000.00		
2 06 0102 2 1 11 02 2	Upah Pungut Retribusi Daerah	4,722,750.00	4,722,750.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 7,497,500.00 SISA UUDP Rp 2,500.00			
		4,722,750.00	4,722,750.00	0.00	0.00	- Uang Perangang/Insentif	4,722,750.00	4,722,750.00	0.00
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,722,750.00	4,722,750.00		
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 4,722,750.00 SISA UUDP Rp 0.00			

524

5.2.3 Balai Pengembangan Produktivitas Kerja

CODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUNLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUNLAH REALISASI	Berlebih/berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH BERKURANG
				RUPIAH	Persen Iasc.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.0104.2.1.11	2 Ung perasang/insentif dan upah pungut	701,000.00	701,000.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 5,575,000.00			
2.06.0104.2.1.11.02	2 Upah Pungut retribusi Daerah	701,000.00	701,000.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 5,575,000.00 SISA UUDF Rp 0.00	701,000.00	701,000.00	0.00
2.06.0104.2.2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	168,341,000.00	168,197,500.00	(143,500.00)	(0.09)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 701,000.00			
2.06.0104.2.2.01	2 Biaya Bahan Material	21,075,000.00	21,075,000.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 701,000.00 SISA UUDF Rp 0.00			
2.06.0104.2.2.01.03	2 Biaya Bahan Obat--obatan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	- Biaya pembelian Obat--obatan	500,000.00	500,000.00	0.00
2.06.0104.2.2.01.05	2 Biaya Bahan Percontohan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	- Biaya Pembelian Bahan Percontohan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.06.0104.2.2.01.06	2 Biaya Alat Tulis Kantor	14,575,000.00	14,575,000.00	0.00	0.00	- Biaya pembelian Alat Tulis Kantor peserta latihan	14,575,000.00	14,575,000.00	0.00
							21,075,000.00	21,075,000.00	0.00

5.3 Dinas Kesehatan
5.3.1 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/berkurang		KETERANGAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH BERKURANG
				RUPIAH	Persen lase.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 01012 1 11 2	2. Uang perorangang/insentif dan upah pungut	21,913,975.00	21,690,000.00	(223,975.00)	(1.02)		21,913,975.00	21,690,000.00	(223,975.00)
2 07 01012 1 11 02 2	Upah pungut Retribusi Daerah	21,913,975.00	21,690,000.00	(223,975.00)	(1.02)	- Upah pungut Retribusi Daerah - SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 21,722,750.00 Rp 21,722,750.00 - SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 21,690,000.00 Rp 21,690,000.00 Sisa UUD? Rp 32,750.00			
2 07 0101 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	834,041,000.00	697,681,200.00	(136,359,800.00)	(16.35)				
2 07 01012 2 01 2	2 Biaya Bahan Material	698,191,000.00	628,842,200.00	(69,348,800.00)	(9.93)				
2 07 0101 2 2 01 03 2	Biaya Bahan Obat-obatan	394,066,000.00	369,564,700.00	(24,501,300.00)	(6.22)	- Biaya Bahan Obat-obatan	394,066,000.00	369,564,700.00	(24,501,300.00)
2 07 0101 2 2 01 04 2	Biaya Bahan Kimia	304,125,000.00	259,277,500.00	(44,847,500.00)	(14.75)	- Biaya Bahan Kimia	304,125,000.00	259,277,500.00	(44,847,500.00)
							698,191,000.00	628,842,200.00	(69,348,800.00)
						- SPMU BT : Rp 498,660,000.00 - SPMU PK : Rp 137,196,000.00 Rp 635,856,000.00 - SPJ BT : Rp 498,660,000.00 - SPJ PK : Rp 130,182,200.00 Rp 628,842,200.00 Sisa UUD? Rp 7,013,800.00			

5.3.2 Balai Laboratorium Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/berkurang		KETERANGAN			
				RUPIAH	Persen	2	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 0102 2 1 11 2	2 Uang perangsang/insentif dan upah pungut	28,772,682.00	28,760,000.00	(12,682.00)	(0.04)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,500,000.00	4,500,000.00		
2 07 0102 2 1 11 02 2	Upah pungut Retribusi Daerah	28,772,682.00	28,760,000.00	(12,682.00)	(0.04)	- Upah pungut Retribusi Daerah - SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 28,772,682.00	28,772,682.00	28,760,000.00	(12,682.00)
2 07 0102 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,248,193,350.00	1,230,261,900.00	(17,931,450.00)	(1.44)				
2 07 0102 2 2 01 2	Biaya Bahan/Material	1,122,038,350.00	1,104,128,900.00	(17,909,450.00)	(1.60)				
2 07 0102 2 2 01 04 2	Biaya Bahan Kimia	1,107,810,600.00	1,090,150,000.00	(17,660,600.00)	(1.59)	- Biaya Bahan Kimia	1,107,810,600.00	1,090,150,000.00	(17,660,600.00)
2 07 0102 2 2 01 05 2	Biaya Bahan Percontohan	9,200,000.00	9,038,500.00	(161,500.00)	(1.76)	- Biaya Bahan Percontohan	9,200,000.00	9,038,500.00	(161,500.00)
2 07 0102 2 2 01 06 2	Biaya Alat Tulis	3,686,750.00	3,660,400.00	(26,350.00)	(0.71)	- Biaya Alat Tulis	3,686,750.00	3,660,400.00	(26,350.00)
2 07 0102 2 2 01 07 2	Biaya Pembelian Alat-alat Perengkapan	1,341,000.00	1,280,000.00	(61,000.00)	(4.55)	- Biaya Pembelian Alat-alat Perengkapan	1,341,000.00	1,280,000.00	(61,000.00)

5.3.3 Balai Pelatihan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	KETERANGAN				Berlebih/berkurang			
		JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	RUPIAH	Persen tase.	8	9	Berlebih Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 0103 2 1 09 2	Honorarium/Upah	50,400,000.00	49,467,500.00	(932,500.00)	(1.85)	- Biaya Honorarium	50,400,000.00	49,467,500.00	(932,500.00)
2 07 0103 2 1 09 01 2	Honorarium/Upah	50,400,000.00	49,467,500.00	(932,500.00)	(1.85)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 50,400,000.00 Rp 50,400,000.00			
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 49,467,500.00 Rp 49,467,500.00			
						Sisa UUDF Rp 932,500.00			
2 07 0103 2 1 11 2	Uang perancang/Insentif dan upah pungut	4,051,450.00	4,050,400.00	(1,050.00)	(0.03)	- Upah pungut Retribusi Daerah	4,051,450.00	4,050,400.00	(1,050.00)
2 07 0103 2 1 11 02 2	Upah pungut Retribusi Daerah	4,051,450.00	4,050,400.00	(1,050.00)	(0.03)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,051,450.00 Rp 4,051,450.00			
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 4,050,400.00 Rp 4,050,400.00			
						Sisa UUDF Rp 1,050.00			
2 07 0103 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,802,000.00	92,268,200.00	(533,800.00)	(0.58)				
2 07 0103 2 2 01 2	Biaya Bahan/Material	8,582,000.00	8,513,200.00	(68,800.00)	(0.80)	- Biaya Alat Tulis	8,582,000.00	8,513,200.00	(68,800.00)
2 07 0103 2 2 01 06 2	Biaya Alat Tulis	8,582,000.00	8,513,200.00	(68,800.00)	(0.80)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 8,582,000.00 Rp 8,582,000.00			

5.3.4 Rumah Sakit GRHASIA

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/berkurang		Keterangan	Rencana	Realisasi	Berlebih/ Berkurang
				Rupiah	Persen tase.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 0200 2	2 BELANJA OPERASI DAN PEMELI HAKAAN	470,084,664.00	464,487,530.00	(5,597,134.00)	(1.19)				
2 07 0200 2 1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	143,807,164.00	140,040,750.00	(3,766,414.00)	(2.62)				
2 07 0200 2 1 08	2 Uang Sidiang/Rapat	2,703,000.00	2,151,000.00	(552,000.00)	(20.42)				(552,000.00)
2 07 0200 2 1 08 01	2 Uang Sidiang/Rapat	2,703,000.00	2,151,000.00	(552,000.00)	(20.42)	- Biaya Rapat	2,703,000.00	2,151,000.00	(552,000.00)
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU PK : Rp 2,703,000.00	Rp 2,703,000.00		
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 2,151,000.00	Rp 2,151,000.00		
						Sisa UUDP Rp 352,000.00			
2 07 0200 2 1 09	2 Honorarium/Upah	81,330,000.00	78,129,750.00	(3,200,250.00)	(3.93)				
2 07 0200 2 1 09 01	2 Honorarium/Upah	81,330,000.00	78,129,750.00	(3,200,250.00)	(3.93)	- Biaya Honorarium Tim	81,330,000.00	78,129,750.00	(3,200,250.00)
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU PK : Rp 81,330,000.00	Rp 81,330,000.00		
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 78,129,750.00	Rp 78,129,750.00		
						Sisa UUDP Rp 3,200,250.00			
2 07 0200 2 1 11	2 Uang Perangsang/Insentif dan upah pungut	59,774,164.00	59,760,000.00	(14,164.00)	(0.02)				
2 07 0200 2 1 11 02	2 Uang Perangsang/Insentif	59,774,164.00	59,760,000.00	(14,164.00)	(0.02)	- Uang Perangsang/Insentif	59,774,164.00	59,760,000.00	(14,164.00)

6. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
6.1 Dinas Pendidikan
6.1.1 Balai Latihan Pendidikan Teknik

Kode rekening	Uraian Kelompok Jenis dan Bbyek	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/Berkurang		KETERANGAN			
				Rupiah	Persen	URAIAN	RENCANA	REALISASI	Berlebih Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 08 01 01 2 1 1 11	2 Uang Lembur	24,450,000.00	16,922,500.00	(7,527,500.00)	(30.79)		24,450,000.00	16,922,500.00	(7,527,500.00)
2 08 01 01 2 1 1 11 01	2 Uang lembur harian	24,450,000.00	16,922,500.00	(7,527,500.00)	(30.79)	- Biaya lembur harian			
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU BT : Rp 24,450,000.00	24,450,000.00		
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 16,922,500.00 Rp 16,922,500.00			
						SISA UUDP Rp 7,927,500.00			
2 08 01 01 2 1 12	2 Uang Perangang/Insentif dan Upah punga	2,882,000.00	2,830,000.00	(52,000.00)	(1.80)		2,882,000.00	2,830,000.00	(52,000.00)
2 08 01 01 2 1 12 2	2 Uang Perangang/Insentif	2,882,000.00	2,830,000.00	(52,000.00)	(1.80)	- Upah Pungut Retribusi Daerah			
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU BT : Rp 2,830,000.00	2,830,000.00		
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 2,830,000.00 Rp 2,830,000.00			
						SISA UUDP Rp 0.00			
2 08 01 01 2 12	2 BELANJA BARANG DAN JASA	1,963,751,600.00	1,602,932,879.00	(360,798,721.00)	(18.37)				
2 08 01 01 2 12 01	2 Biaya Bahan/Material	1,836,131,600.00	1,481,322,479.00	(354,809,121.00)	(19.32)				
2 08 01 01 2 12 01 05	2 Biaya Bahan Percontohan	1,834,881,600.00	1,480,132,479.00	(354,749,121.00)	(19.33)	- Biaya Bahan Percontohan	1,834,881,600.00	1,480,132,479.00	(354,749,121.00)
2 08 01 01 2 12 01 05 2	2 Biaya Alat Tulis	1,250,000.00	1,190,000.00	(60,000.00)	(4.80)	- Biaya Alat Tulis	1,250,000.00	1,190,000.00	(60,000.00)
							1,836,131,600.00	1,481,322,479.00	(354,809,121.00)

6.1.2 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/Berkurang		URAIAN	KETERANGAN			BERLEBIH BERKURANG
				Perish	Ropiash		RENCANA	REALISASI	BERLEBIH BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 08 01 02 2 1 12 2	2 Uang Perangsang/Insentif dan Upah pungut	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	- Upah Pungut Retribusi Daerah	472.500,00	472.500,00	0,00	
2 08 01 02 2 1 12 01 2	2 Uang Perangsang/Insentif	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	- SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU BT : Rp 472.500,00	472.500,00	472.500,00	0,00	
2 08 01 02 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	49.945.900,00	48.005.900,00	(1.940.000,00)	(3.885)					
2 08 01 02 2 2 01	2 Biaya Bahan Material	7.585.900,00	7.585.900,00	0,00	0,00	- Biaya Alat Tulis	7.585.900,00	7.585.900,00	0,00	
2 08 01 02 2 2 01 02	2 Biaya Alat Tulis	7.585.900,00	7.585.900,00	0,00	0,00	- SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU BT : Rp 7.585.900,00	7.585.900,00	7.585.900,00	0,00	
2 08 01 02 2 2 02	2 Biaya Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	- SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 7.585.900,00 Rp 7.585.900,00				
2 08 01 02 2 2 02 02	2 Biaya Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	- Biaya Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
						SISA UUDP Rp 0,00				
						SISA UUDP Rp 1.200.000,00				

6.2 Dinas Kebudayaan
6.2.1 Museum Sono Budoyo

756

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Bekurang		URAIAN	REKONSTRUKSI	BERLEBIH/ BERKURANG
				Rupiah	Persen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.02.012.1.12	2. Upah Pungut Retribusi Daerah	1.594,075.00	1.594,075.00	0.00	0.00	- Upah pungut retribusi daerah	1.594,075.00	0.00
2.08.02.012.1.12.01.2		1.594,075.00	1.594,075.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 1.594,075.00	1.594,075.00	0.00
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 1.594,075.00	1.594,075.00	0.00
						SISA UUDP Rp 0.00	0.00	0.00
2.08.02.012.2	2. BELANJA BARANG DAN JASA	203,560,250.00	198,277,250.00	(5,283,000.00)	(2.60)			
2.08.02.012.2.01	2. Biaya Bahan/Material	29,437,750.00	29,437,750.00	0.00	0.00			
2.08.02.012.2.01.01.2	Biaya Bahan Baku/Bangunan	7,137,000.00	7,137,000.00	0.00	0.00	- Biaya Bahan Baku/Bangunan	7,137,000.00	0.00
2.08.02.012.2.01.04.2	Biaya Bahan Kimia	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	- Biaya Tingkat Nasional dan regional	20,000,000.00	0.00
2.08.02.012.2.01.06.2	Biaya Alat Tulis	1,050,750.00	1,050,750.00	0.00	0.00	- Biaya Alat Tulis	1,050,750.00	0.00
2.08.02.012.2.01.07.2	Biaya Pembelian Alat-alat/Perlengkapan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	- Biaya Pembelian Alat-alat/Perlengkapan	1,250,000.00	0.00
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 29,437,750.00	29,437,750.00	0.00
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 29,437,750.00	29,437,750.00	0.00
						SISA UUDP Rp 0.00	0.00	0.00

6.2.2 Taman Budaya		769									
KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Berlebih/Berkurang		KETERANGAN					
				Rupiah	Persen	URAIAN	RENCANA	REALISASI	Berlebih/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2 08 02 02 2 1	BELANJA PEGAWAI/PERSO NALIA	347,376,250.00	337,342,250.00	(10,034,000.00)	(2.89)						
2 08 02 02 1 08	Uang Sidang/Rapat	10,815,000.00	6,758,500.00	(4,056,500.00)	(37.51)						
2 08 02 02 1 08 01	Uang Sidang/Rapat	10,815,000.00	6,758,500.00	(4,056,500.00)	(37.51)	Uang Rapat	10,815,000.00	6,758,500.00	(4,056,500.00)		
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 10,815,000.00	10,815,000.00				
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 6,758,500.00	6,758,500.00				
						SISA UUDP Rp 4,056,500.00					
2 08 02 02 2 1 09	Honorarium/Upah	156,500,000.00	152,415,000.00	(4,085,000.00)	(2.61)	Honorarium	156,500,000.00	152,415,000.00	(4,085,000.00)		
2 08 02 02 2 1 09 01	Honorarium	156,500,000.00	152,415,000.00	(4,085,000.00)	(2.61)						
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 155,000,000.00	155,000,000.00				
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 152,415,000.00	152,415,000.00				
						SISA UUDP Rp 2,555,000.00					
2 08 02 02 2 1 11	Uang Perangsgang/Insentif dan Upah Pungut	4,061,250.00	3,668,750.00	(392,500.00)	(9.66)						
2 08 02 02 2 1 11 02	Uang Perangsgang/Insentif	4,061,250.00	3,668,750.00	(392,500.00)	(9.66)	Upah pungut retribusi daerah	4,061,250.00	3,668,750.00	(392,500.00)		
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,061,250.00	4,061,250.00				

6.3 Badan Perpustakaan Daerah

785

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN ORYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		Persen Isa	KETERANGAN			
				Rupiah	5		6	7	8	9
2 08 03 00 2 1 11	2 Uang Perangsang/insentif dan Upah Pungut	1,216,350.00	1,216,350.00	0.00	0.00	0.00	URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
							- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 4,220,000.00 Rp 4,220,000.00			
							- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 3,432,500.00 Rp 3,432,500.00 SISA UUDP Rp 787,500.00			
2 08 03 00 2 1 10 01 2	Uang Perangsang/insentif	1,216,350.00	1,216,350.00	0.00	0.00	0.00	Uang Perangsang/insentif	1,216,350.00	1,216,350.00	0.00
							- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 1,216,350.00 Rp 1,216,350.00			
							- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 1,216,350.00 Rp 1,216,350.00 SISA UUDP Rp 0.00			
2 08 03 00 2 1 12	2 Uang Bantuan Penghargaan	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	- Uang Pembinaan Lomba	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
2 08 03 00 2 1 12 01 2	Uang Bantuan Penghargaan	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 3,200,000.00 Rp 3,200,000.00			
							- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 3,200,000.00 Rp 3,200,000.00 SISA UUDP Rp 0.00			

7. Bidang Sosial
7.1 Dinas Sosial

800

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK, URAIAN DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		URAIAN	RENCANA	KETERANGAN	
				Rupiah	Persen			REALISASI	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 00 2 1 09 2	Honorarium/upah	404,155,000.00	388,845,000.00	(15,310,000.00)	(3.79)	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 28,805,500.00 Rp 28,805,500.00 SISA UUDP Rp 3,288,500.00	404,155,000.00	388,845,000.00	(15,310,000.00)
2 09 01 00 2 1 09 01 2	Honorarium	404,155,000.00	388,845,000.00	(15,310,000.00)	(3.79)	Honorarium Tim/Panitia/Instruktur - SPJU BT : Rp 0.00 - SPJU PK : Rp 404,155,000.00 Rp 404,155,000.00			
2 09 01 00 2 1 10 2	Uang lembur	435,000.00	430,000.00	(5,000.00)	(1.15)	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 388,845,000.00 Rp 388,845,000.00 SISA UUDP Rp 15,310,000.00			
2 09 01 00 2 1 10 01 2	Uang Lembur Harian	435,000.00	430,000.00	(5,000.00)	(1.15)	Uang Lembur Harian - SPJU BT : Rp 0.00 - SPJU PK : Rp 435,000.00 Rp 435,000.00	435,000.00	430,000.00	(5,000.00)
2 09 01 00 2 1 11 2	Uang Perangsang/Insentif dan Upah Pungut	8,500,000.00	5,072,714.00	(3,427,286.00)	(40.32)	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 430,000.00 Rp 430,000.00 SISA UUDP Rp 5,000.00			
2 09 01 00 2 1 11 01 2	Upah Pungut Pendapatan Lain-lain	8,500,000.00	5,072,714.00	(3,427,286.00)	(40.32)	Upah Pungut Pendapatan Lain-lain	8,500,000.00	5,072,714.00	(3,427,286.00)

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Bekurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
				Rupiah	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.01.00.2.1.10.2	Uang Lembur	3,055,000.00	2,267,500.00	(787,500.00)	(25.78)	Uang Lembur Harian	3,055,000.00	2,267,500.00	(787,500.00)
2.10.01.00.2.1.10.01.2	Uang Lembur Harian	3,055,000.00	2,267,500.00	(787,500.00)	(25.78)	Uang Lembur Harian	3,055,000.00	2,267,500.00	(787,500.00)
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU PK : Rp 3,055,000.00			
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 2,267,500.00			
						SISA UUDP Rp 787,500.00			
2.10.01.00.2.1.11	Uang Perangsang/Insentif dan Upah Pungut	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00	0.00				
2.10.01.00.2.1.11.02	Uang Perangsang/Insentif	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00	0.00	Upah Pungut Retribusi Daerah	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU PK : Rp 1,104,700.00			
						- SPJ BT : Rp 0.00			
						- SPJ PK : Rp 1,104,700.00			
						SISA UUDP Rp 0.00			
2.10.01.00.2.1.12	Uang Bantuan Penghargaan	50,000,000.00	49,680,000.00	(320,000.00)	(0.64)				
2.10.01.00.2.1.12.01	Uang Bantuan Penghargaan	50,000,000.00	49,680,000.00	(320,000.00)	(0.64)	Biaya Pemberian hadiah lomba	50,000,000.00	49,680,000.00	(320,000.00)
						- SPMU BT : Rp 0.00			
						- SPMU PK : Rp 50,000,000.00			

8. Bidang Perwisata
8.1 Dinas Pariwisata Daerah

9. Bidang Penataan Ruang, Pemukiman dan Pekerjaan Umum.
9.1 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

928

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUNLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUNLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
				Rupiah	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 01 002 1 09 2	Honorarium Upah	502.821.520,00	359.722.712,00	(143.098.808,00)	(28,46)		502.821.520,00	359.722.712,00	(143.098.808,00)
2 11 01 002 1 09 01 2	Honorarium	502.821.520,00	359.722.712,00	(143.098.808,00)	(28,46)	- Biaya Tim dan Kepanitiaan - SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 502.821.520,00	502.821.520,00		
2 11 01 002 1 10 2	Uang Lembur	53.230.000,00	48.435.000,00	(4.795.000,00)	(9,01)			48.435.000,00	(4.795.000,00)
2 11 01 002 1 10 02 2	Uang Lembur Harian	53.230.000,00	48.435.000,00	(4.795.000,00)	(9,01)	- Biaya lembur Kelebihan jam Kerja - SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 53.230.000,00	53.230.000,00		
2 11 01 002 1 11 2	Uang Perangsang/Insentif dan Upah Pungut	3.508.400,00	3.508.400,00	0,00	0,00				
2 11 01 002 1 11 01 2	Upah Pungut Retribusi	1.335.500,00	1.335.500,00	0,00	0,00	Biaya Upah Pungut	1.335.500,00	1.335.500,00	0,00
2 11 01 002 1 11 02 2	Upah Pungut Pendapatan Lain-Lain	2.172.900,00	2.172.900,00	0,00	0,00	Biaya Upah Pungut	2.172.900,00	2.172.900,00	0,00
			3.508.400,00				3.508.400,00	3.508.400,00	0,00
						- SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 3.508.400,00	3.508.400,00		

9.2 Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan (BPKL)

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		KETERANGAN				BERLEHIB/BERKURANG
				Rupiah	Persen	URAIAN	RENCANA	REALISASI	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 11 01 03 2 1 11 2	Uang perangsang/Insentif dan Upah Pungut	3,489,030.00	3,489,030.00		0.00	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 12,044,000.00	3,489,030.00		0.00	
2 11 01 03 2 1 11 03 2	Upah pungut Pendapatan Lain-lain	3,489,030.00	3,489,030.00		0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 4,187,500.00 Rp 4,187,500.00 SISA UUDP Rp 7,856,500.00				
						Biaya Pemungutan retribusi				
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 3,489,030.00	3,489,030.00			
						- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 3,489,030.00 Rp 3,489,030.00 SISA UUDP Rp 0.00				
2 11 01 03 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,135,350.00	129,372,650.00	(19,762,700.00)	(13.25)					
2 11 01 03 2 2 01 2	Biaya Bahan/Material	60,920,950.00	59,152,050.00	(1,768,900.00)	(2.90)					
2 11 01 03 2 2 01 2	Biaya Bahan Baku/Bangunan	16,158,500.00	15,185,100.00	(973,400.00)	(6.02)	- Biaya pembelian bahan pengujian tanah dan batuan	16,158,500.00	15,185,100.00	(973,400.00)	
2 11 01 03 2 2 01 04 2	Biaya Bahan Kimia	31,870,000.00	31,150,000.00	(720,000.00)	(2.26)	- Biaya pembelian bahan kimia pengujian mutu air	31,870,000.00	31,150,000.00	(720,000.00)	
2 11 01 03 2 2 01 07 2	Biaya Bahan Kimia	12,892,450.00	12,816,950.00	(75,500.00)	(0.59)	- Biaya pembelian bahan pengujian bahan bangunan	12,892,450.00	12,816,950.00	(75,500.00)	
						- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 60,920,950.00	60,920,950.00			
								59,152,050.00	(1,768,900.00)	

10. Bidang Perhubungan
10.1 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUNJAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUNJAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		KETERANGAN	RENCANA	REALISASI	BERLEBIH BERKURANG
				Rupiah	Person				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 00 2 1 11	2 Usang Perangas/Insentif dan Upah Pungut	14,462,812.00	14,462,812.00	0.00	0.00	- SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 55,709,000.00 Rp 55,709,000.00 SISA UUDP Rp 3,291,000.00	14,462,812.00	14,462,812.00	0.00
2 12 01 00 2 1 11 02 2	Upah Pungut Retribusi	14,462,812.00	14,462,812.00	0.00	0.00	Insentif/Upah Pungut Retribusi	14,462,812.00	14,462,812.00	0.00
2 12 01 00 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JAS	1,219,291,106.00	1,035,274,030.00	(184,017,076.00)	(15.09)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 14,462,812.00 14,462,812.00 - SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 14,462,812.00 Rp 14,462,812.00 SISA UUDP Rp 0.00			
2 12 01 00 2 2 01	2 Biaya Bahan Material	51,350,000.00	11,400,000.00	(39,950,000.00)	(77.80)	- Biaya Pembelian Obat-obatan (PJK)	100,000.00	100,000.00	0.00
2 12 01 00 2 2 01 03 2	Biaya Bahan/Obat-obatan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	- Biaya Pembelian Perangkat Seminar/pembiinan dan pe-nyulahan perhubungan	51,250,000.00	11,300,000.00	(39,950,000.00)
2 12 01 00 2 2 01 07 2	Biaya Pembelian Alat-alat Per-engkapan	51,250,000.00	11,300,000.00	(39,950,000.00)	(77.95)	- SPMU BT : Rp 0.00 - SPMU PK : Rp 51,350,000.00 51,350,000.00 - SPJ BT : Rp 0.00 - SPJ PK : Rp 11,400,000.00 Rp 11,400,000.00 SISA UUDP Rp 39,950,000.00	51,350,000.00	11,400,000.00	(39,950,000.00)

1007

10.2 Kantor Pengendalian Muatan Barang

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK JENIS DAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUNMLAH REALISASI	Berlebih/Berkurang		URAIAN	RENCANA	REALISASI	BELEBIH/BERKURANG*
				Rupiah	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01 01 2 1 10	2 Uang Lembur	87.750,000.00	87.725,000.00	(25,000.00)	(0,03)	- SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 5.130,000.00 Rp 5.130,000.00 SISA UUDP Rp 0,00			
2 12 01 01 2 1 10 01 2	Uang Lembur Harian	87.750,000.00	87.725,000.00	(25,000.00)	(0,03)	- Uang Lembur Operasional pengesakan hukuman kelebihan muatan barang - SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 87.750,000.00 Rp 87.750,000.00 - SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 87.725,000.00 Rp 87.725,000.00 SISA UUDP Rp 25,000.00	87.750,000.00	87.725,000.00	(25,000.00)
2 12 01 01 2 1 12	2 Uang Perangas/Insentif dan Upah Pungut	131.284,850.00	131.284,850.00	0,00	0,00	Upah Pungut Retribusi Jembatan Timbang - SPMU BT : Rp 0,00 - SPMU PK : Rp 131.284,850.00 Rp 131.284,850.00 - SPJ BT : Rp 0,00 - SPJ PK : Rp 131.284,850.00 Rp 131.284,850.00 SISA UUDP Rp 0,00	131.284,850.00	131.284,850.00	0,00
2 12 01 01 2 1 12 04 2	Upah Pungut Retribusi	131.284,850.00	131.284,850.00	0,00	0,00		131.284,850.00	131.284,850.00	0,00